

**ANALISIS PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, PENGENDALIAN  
PERSEPSI PERILAKU, DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MELAKSANAKAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA**

**(STUDI PADA UMKM WILAYAH SEMARANG)**

**Skripsi**



Oleh:

**Iis Naini Kurnia Wati**

**NIM: 31401800073**

Diajukan kepada:

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, PENGENDALIAN  
PERSEPSI PERILAKU, DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MELAKSANAKAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (STUDI PADA UMKM WILAYAH  
SEMARANG)**

**Di Susun Oleh:**

**Iis Naini Kurnia Wati**

**Nim. 31401800073**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian penelitian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 31 Maret 2022

Khoirul Fuad, SE.,M.Si.,AK.,CA

NIK. 211413023

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, PENGENDALIAN**  
**PERSEPSI PERILAKU, DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP**  
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MELAKSANAKAN**  
**KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (STUDI PADA UMKM WILAYAH**  
**SEMARANG)**

Di Susun Oleh:

Iis Naini Kurnia Wati

Nim: 31401800073

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 22 April 2022

**Susunan Dewan Penguji**

**Pembimbing**

**Penguji**



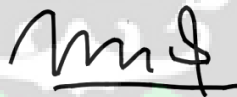
Khoirul Fuad, SE.,M.Si.,AK.,CA

Dr. Chrisna Suhendi, SE.,MBA.,AK.,CA

NIK. 211413023

NIK. 210493034

**Penguji**



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE.,M.Si.,CSRS

NIK. 211415029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu  
Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Tanggal 22 April 2022

**Ketua Program Studi**



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE.,M.Si.,CSRS

NIK. 211415029

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Iis Naini Kurnia Wati  
Nim : 31401800073  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian Persepsi Perilaku, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya (Studi Pada UMKM Wilayah Semarang)**” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara tidak sesuai etika dan tradisi keilmuan. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Iis Naini Kurnia Wati

NIM. 31401800073

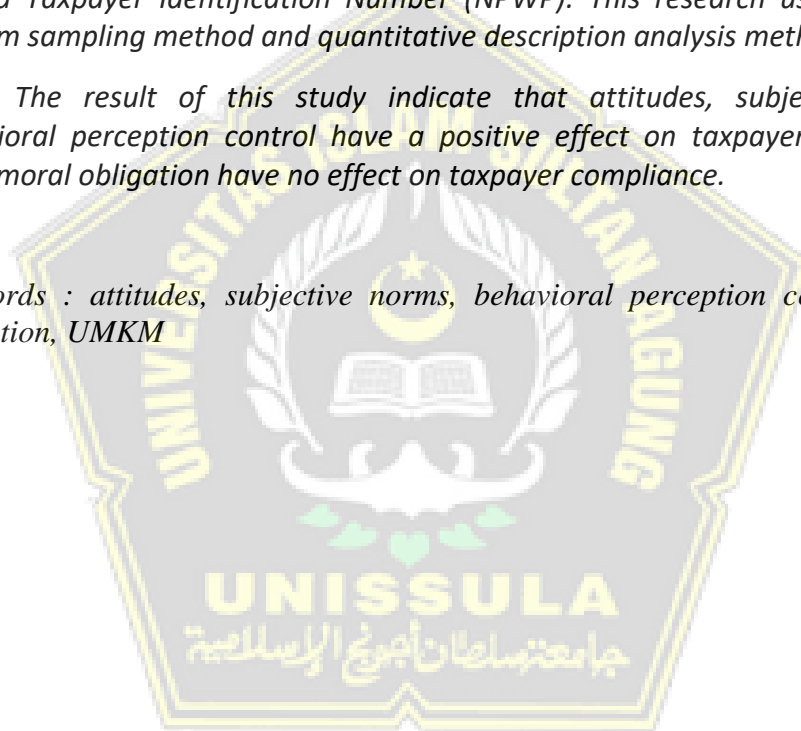
## **ABSTRACT**

*The economy in Indonesian has been dominated by the business sector based on Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). This business group has proven to be able to make a significant contribution, providing an opportunity for the government to target this sector in an effort to increase taxes.*

*This research contributes to economic development by looking at how big UMKM are carrying out their tax obligation. Attitudes, subjective norms, behavioral perception control, moral obligation are independent variable and taxpayer compliance is the dependent variable. The population in this study are Micro, Small, and Medium Enterprises located in Semarang Region which already have a Taxpayer Identification Number (NPWP). This research uses purposive random sampling method and quantitative description analysis method.*

*The result of this study indicate that attitudes, subjective norms, behavioral perception control have a positive effect on taxpayer compliance, while moral obligation have no effect on taxpayer compliance.*

*Keywords : attitudes, subjective norms, behavioral perception control, moral obligation, UMKM*



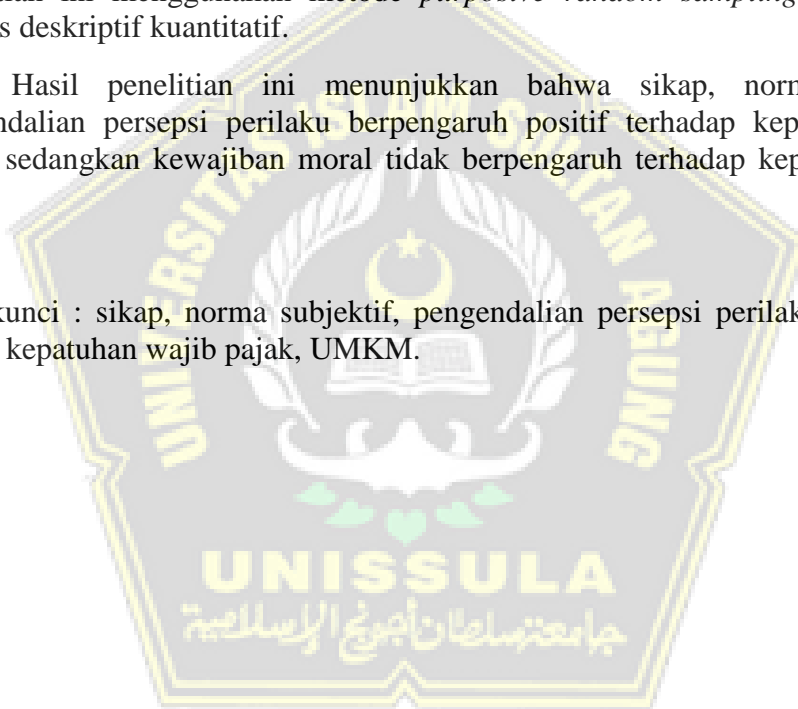
## ABSTRAK

Perekonomian di Indonesia telah didominasi oleh sektor usaha yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sendiri mampu memberikan kontribusi yang cukup baik, hal ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk memilih sektor ini dalam melakukan upaya peningkatan pajak.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi dengan melihat seberapa besar UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku, kewajiban moral merupakan variabel independen dan kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini ialah UMKM yang berada pada Wilayah Semarang yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini menggunakan metode *purposive random sampling* dan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku, kewajiban moral, kepatuhan wajib pajak, UMKM.



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iis Naini Kurnia Wati

---

Nim : 31401800073

---

Program Studi : Akuntansi

---

Fakultas : Ekonomi

---

Dengan ini menyerahkan karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian Persepsi Perilaku, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya (Studi Pada UMKM Wilayah Semarang)”** dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Maret 2022

Yang menyatakan,



Iis Naini Kurnia Wati

NIM. 31401800073

## HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN :

- Allah SWT, Sebagai bentuk rasa syukur atas ilmu yang telah diberikan
- Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Kosim dan Ibu Kamana yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang
- Kepada kedua kakak saya yaitu Nurrahmawati dan Fitriyah Ningsih serta teman-teman Fakultas Ekonomi Unissula

### MOTTO :

**“Everyone has their step”**

~Penulis~

**“The possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that can possibility happen”**

~Mark Lee~

**“Jelajahi segala penjuru dunia, berkelanalah ke seluruh pelosoknya”**

~Al-Mulk:15~

**“Our tomorrow maybe dark, painful, difficult and we might stumble or fall down but the star shine brightest when the night is darkest”**

~Kim Namjoon~



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti ini dapat menyelesaikan dalam penyusunan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian Persepsi Perilaku, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya (Studi Pada UMKM Wilayah Semarang)”**. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan usulan penelitian untuk skripsi banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberikan masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar fakultas ekonomi universitas islam sultan agung semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak, ibu dan kakak saya yang telah memberikan semangat dan membantu selama penulis berkuliah di universitas islam sultan agung semarang.
6. Terimakasih untuk diri saya sendiri dan semua teman maupun sahabat saya yang telah memberikan semangat dan dukungan.
7. Seluruh pihak lain yang telah membantu menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian untuk skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Namun, penulis berharap semoga usulan skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 22 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Iis Naini Kurnia Wati

NIM. 31401800073

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
ABSTRAK .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Teori Akuntansi Keperilakuan .....	12
2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB).....	14
2.1.3 Teori Atribusi .....	17
2.1.4 Pajak .....	19
2.1.5 Kepatuhan wajib pajak .....	21
2.1.6 Sikap.....	23
2.1.7 Norma Subjektif .....	24
2.1.8 Persepsi pengendalian perilaku .....	25
2.1.9 Kewajiban moral .....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.2.1 Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
2.2.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	29
2.2.3 Pengaruh Pengendalian persepsi perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	30

2.2.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	32
2.3 Hipotesis Penelitian .....	33
2.3.1 Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang .....	33
2.3.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang .....	34
2.3.3 Pengaruh Pengendalian persepsi perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.....	35
2.3.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang. ....	35
2.4 Model Penelitian.....	36
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis penelitian .....	37
3.2 Populasi .....	38
3.3 Sampel .....	38
3.4 Metode pengumpulan data .....	40
3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	41
3.5.1 Variabel Dependen .....	41
3.5.1.1 Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) .....	41
3.5.2 Variabel Independen.....	42
3.5.2.1 Sikap .....	42
3.5.2.2 Norma Subjektif .....	43
3.5.2.3 Pengendalian persepsi perilaku .....	45
3.5.2.4 Kewajiban Moral.....	46
3.6 Metode Analisis.....	48
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
3.6.2 Uji Kualitas Data .....	49
3.6.2.1 Uji Validitas .....	49
3.6.2.2 Uji Reliabilitas.....	50
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	50
3.6.3.1 Uji Normalitas .....	50
3.6.3.2 Uji Multikolonieritas .....	51
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	51
3.6.5 Uji Keباikan Model .....	52

3.6.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	52
3.6.5.2 Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) .....	52
3.6.5.3 Pengujian Hipotesis .....	53
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner .....	55
4.2 Gambaran Umum Responden.....	55
4.3 Analisis data .....	60
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	60
4.3.2 Uji Kualitas data .....	63
4.3.2.1 Uji Validitas .....	63
4.3.2.2 Uji Reliabilitas .....	66
4.3.3 Uji Asumsi Klasik .....	67
4.3.3.1 Uji Normalitas.....	67
4.3.3.2 Uji Multikolonieritas.....	68
4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	69
4.3.5 Uji Keباikan Model .....	71
4.3.5.1 Uji Signifikansi Simultan (F).....	71
4.3.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	73
4.3.5.3 Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	74
4.3.6 Pembahasan Hasil.....	76
4.3.6.1 Pembahasan Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Wilayah Semarang.....	76
4.3.6.2 Pembahasan Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Wilayah Semarang.....	78
4.3.6.3 Pembahasan Pengaruh Pengendalian Persepsi Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Wilayah Semarang.....	79
4.3.6.4 Pembahasan Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Wilayah Semarang.....	80
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran .....	84
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Pengendalian persepsi perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator .....	47
Tabel 4. 1 Jumlah Kuesioner Yang Disebar.....	55
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	56
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	57
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Tahun .....	59
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....	60
Tabel 4. 7 Uji Statistik Deskriptif .....	61
Tabel 4. 8 Uji Validitas .....	64
Tabel 4. 9 Uji Reliabilitas .....	66
Tabel 4. 10 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov .....	68
Tabel 4. 11 Uji Multikolonieritas.....	69
Tabel 4. 12 Uji Regresi Linear Berganda.....	70
Tabel 4. 13 Uji Signifikansi Simultan (F).....	72
Tabel 4. 14 Uji Koefisien Determinasi .....	73
Tabel 4. 15 Uji Parsial (t).....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model penelitian.....	36
Gambar 4. 1 Grafik Probability Plot .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuesioner.....	91
Lampiran 1. 2 Tabulasi .....	98
Lampiran 1. 3 Hasil Pengolahan SPSS .....	111
Lampiran 1. 4 Bukti kuesioner.....	126





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak menggambarkan elemen krusial bagi ekspansi ekonomi Indonesia karena pajak memberikan bantuan terbesar terhadap pendapatan negara. Pemerintah memerlukan bantuan masyarakat dalam melakukan perbaikan fasilitas umum, terutama jalan raya, fasilitas perawatan, dan fasilitas publik lainnya. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dalam rangka membangun ekonomi Indonesia untuk kepentingan seluruh masyarakat. Indonesia adalah negara berkembang dengan banyak pembangunan diberbagai bidang, sehingga membutuhkan pendanaan yang cukup besar (Samudra et al., 2020). Oleh sebab itu, peran aktif masyarakat merupakan pondasi utama dalam melakukan donasi kepada negara dalam bentuk perpajakan.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan fiskal negara, mengakibatkan pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan negara dengan melakukan pembangunan jangka panjang, terutama dalam sektor pajak yang merupakan sumber utama negara. Tindakan pemerintah dimulai dengan adanya penerapan *self assessment system*, di mana sistem ini dapat digunakan dalam pemungutan pajak yang memungkinkan pembayar pajak untuk menentukan sendiri jumlah pembayaran kena pajaknya. Penerapan sistem ini menunjukkan yang mana para pembayar pajak harus

melakukan kalkulasi dan pembayaran secara akurat (A. L. Lesmana & Setyadi, 2020).

*Self assessment system* berlaku untuk perhitungan pajak baik individu maupun badan yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Pembayar pajak dapat saja melaporkan lebih sedikit atau bahkan tidak melaporkan sama sekali pendapatan kena pajaknya yang seharusnya dilaporkan dengan merujuk pada panduan aturan yang berlaku. Masyarakat harus memiliki peran aktif dalam melakukan kewajibannya jika merujuk pada penerapan *self assessment system*.

Peningkatan penerimaan negara dibidang fiskal yang diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dapat terjadi ketika diikuti dengan kinerja usaha yang lebih baik. Pemerintah mengeluarkan aturan yang baru dengan intensi dimana seseorang makin paham dan memutuskan untuk ikut serta dalam rangka pemungutan kewajibannya. Pajak ditarik oleh negara dengan berdasar pada aturan perpajakan yang digunakan untuk pengelolaan biaya pabrikan baik barang maupun jasa dengan tujuan kepentingan bersama.

Pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi negara melalui kebijakan perpajakan. Dengan tujuan memelihara produksi dalam negeri, pemerintah memberlakukan tarif impor yang lebih mahal untuk produk luar negeri dengan bertujuan untuk kesetimbangan perekonomian. Pemerintah mempunyai anggaran untuk menjalankan standar dari pajaknya yang berkenaan dengan kesetimbangan ekonomi, tarif pajak yang disetor oleh pembayar pajak akan digunakan oleh

negara dalam rangka melayani semua kepentingan masyarakat, termasuk pendanaan terhadap pembangunan, dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat, serta akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya permasalahan tingkat loyalitas pembayar pajak cukup menjadi masalah unggul yang dihadapi hampir seluruh negara yang menggunakan teknik aturan perpajakan, di Indonesia tingkat loyalitas para pembayar pajak masih berada di tingkat yang terbawah. Kecilnya tingkat loyalitas para pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat menggundahkan jika dibandingkan dengan progress wirausaha di Indonesia (Sudirman et al., 2020)

Anggota kabinet bagian keuangan indonesia, Sri Mulyani menjelaskan dimana rasio pajak indonesia berada pada level 11%. Rasio ini mengindikasikan bahwa tingkat loyalitas para pembayar pajak indonesia adalah yang terendah di dunia, untuk menaikkan tingkat rasio pajak, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kepatuhan pajak yang didasarkan atas kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk memajukan indonesia di tengah perlambatan perekonomian yang terjadi saat ini (Farida et al., 2020).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I telah mencatat dimana penerimaan iuran wilayah Jawa Tengah berada pada angka 40,5% untuk triwulan kedua pada tahun 2021, dengan pencapaian Rp.12,68 Triliun dari target Rp.31,3 Triliun. Perolehan iuran ini sendiri mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,21% (Aris, 2021). KPP Pratama Salatiga dan KP2KP Ungaran melakukan

pemantauan SPT tahunan Kabupaten Semarang yang mana menjelaskan bahwa kepatuhan membayar pajak warga kabupaten Semarang dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan pada 2020 berada pada angka 80% (Novena, 2020). Kepatuhan membayar pajak warga Semarang belum tinggi sehingga perlu sosialisasi agar kepatuhan pembayar pajak meningkat. Dengan melihat fenomena ini kepatuhan wajib pajak Semarang belum mencapai 100% yang mana 20% masih melakukan tunggakan atau belum patuh terhadap perpajakan sehingga dapat dikatakan kepatuhan pajak di Semarang belum optimal.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menggambarkan bagian usaha informal yang menjadi elemen krusial dan mengontrol ekonomi Indonesia. UMKM cukup andil setiap tahunnya yang mana selalu tumbuh yakni industri dalam sektor ekonomi yang menjalankan usahanya secara individu ataupun industri usaha yang bukan anggota dari industri perseorangan, cabang, maupun industri penguasa yang telah mencapai standar usaha relik (Nainggolan & Patimah, 2019). Eskalasi UMKM sendiri dapat dijadikan sumber penerimaan pajak serta menambah nilai kekayaan negara.

Pemerintah harus andil untuk melakukan upaya agar para pembayar pajak melakukan kewajibannya secara sukarela yang mana akan mengoptimalkan penerimaan pajak dari kalangan UMKM, seperti dengan terdapatnya pembaharuan kebijakan. Pemerintah berharap pelaku UMKM dapat selalu berkontribusi dalam bidang perpajakan agar berpotensi menaikkan pemasukan negeri.

Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 diketahui bahwa pemungutan Pph final yaitu sebesar 1%. Pemerintah Indonesia telah melakukan revisi di tahun 2018 mengenai peraturan ini dalam rangka berupaya agar kepatuhan membayar pajak kalangan UMKM dapat meningkat dengan dibentuknya PP No 23 Tahun 2018 yang dikukuhkan pada 1 juli 2018, regulasi ini mengatur bahwa pemungutan Pph final diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Direktorat jenderal pajak sudah membuat kegiatan sosialisasi penurunan Pph final yang sangat berdampak bagi perpajakan indonesia, dikarenakan dengan adanya peraturan terbaru dimana terjadi penurunan Pph final akan mengakibatkan pembayar pajak di kalangan UMKM makin meningkat.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Wilayah Semarang hingga akhir 2021 menyebutkan bahwa UMKM terdaftar di wilayah Semarang berjumlah 22.226. Pertumbuhan UMKM tidak dapat dipandang dari kuantitasnya saja melainkan secara kualitas dengan melihat dari peningkatan omzet UMKM di wilayah Semarang. Dengan banyaknya jumlah UMKM ini, perpajakan berharap agar kontribusi kalangan UMKM dalam melakukan perpajakannya dapat berjalan, karena dengan adanya pembayar pajak UMKM akan dapat membantu peningkatan pertumbuhan rasio pajak.

Sikap adalah keyakinan pembayar pajak terhadap perilaku kepatuhan yang akan menciptakan sebuah bentuk sikap terhadap kepatuhan pajak. Sikap dapat berbentuk reaksi dukungan atau memihak dapat pula berbentuk reaksi tidak memihak pada suatu objek (Noermansyah & Aslamadin, 2019). Kurangnya kesadaran pembayar pajak terhadap profitabel jika berpartisipasi untuk negara

menjadi salah satu argumen hal ini mampu terjadi. Berdasarkan observasi yang dikerjakan oleh (Yustikasari et al., 2020) menjelaskan dimana sikap berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut observasi (D. Lesmana et al., 2017) menunjukkan bahwa sikap tidak berdampak terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

Norma subjektif menggambarkan keseriusan dari seseorang seperti keluarga dekat, teman, mitra kerja, dan masyarakat yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap tumpuan yang dimiliki individu lain dan dapat memberi dampak terhadap minat untuk menjalankan maupun tidak menjalankan perbuatan yang lagi dijadikan pertimbangan (Sudirman et al., 2020). Norma subjektif sendiri dianggap penting karena pandangan orang lain mampu memberikan persepsi yang mana seorang pembayar pajak dalam berkepribadian tunduk maupun tidak tunduk terhadap kewajibannya. Dalam observasi yang dilakukan (D. Lesmana et al., 2017) menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berdampak terhadap kepatuhan para pembayar pajak. Berbeda dengan observasi yang dikerjakan oleh (Anggraeni et al., 2021) menyimpulkan bahwa norma subjektif mempengaruhi seseorang dalam berlaku patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pengendalian persepsi perilaku ialah kuat atau tidaknya seorang individu dalam mengendalikan sesuatu semacam melaporkan penghasilan lebih sedikit dan mengurangi jumlah biaya yang sebagaimana mestinya tidak boleh dikurangkan serta tindakan ketidakpatuhan lainnya (Noermansyah & Aslamadin, 2019). Pengendalian persepsi perilaku dianggap penting karena seorang individu

memiliki kontrol sepenuhnya atas dirinya sendiri mengenai tindakan yang akan dilakukan dan berkaitan dengan kepatuhan dalam kewajiban di bidang perpajakan. Menurut pengkajian yang telah dikerjakan oleh (Farida et al., 2020) menunjukkan bahwa pengendalian persepsi perilaku berdampak terhadap kepatuhan para pembayar pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sedangkan berdasarkan pengkajian (Kawengian et al., 2017) memberikan hasil yang berbeda, dimana pengendalian persepsi perilaku tidak dapat memberikan dampak taat para pembayar pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban moral yakni etika pribadi yang tertanam pada seseorang namun bisa saja tidak ada pada individu lain seperti hakikat hidup, rasa bersalah, dan juga secara sukarela melakukan kewajiban perpajakan (Ruky et al., 2018). Moralitas yang berasal dari wajib pajak sangat berpengaruh dengan keadaan sikap dari pembayar pajak itu sendiri sehingga ini akan terkait dengan kepatuhan pembayar pajak. Pengkajian yang dikerjakan oleh (A. L. Lesmana & Setyadi, 2020) menunjukkan dimana moralitas pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan pengkajian milik (Ramadhan, 2017) dengan fokus penelitian terhadap moralitas. Hasil penelitiannya menyatakan di mana taatnya seorang pembayar pajak dalam melakukan kewajibannya tidak di sebabkan oleh moralitas yang dimilikinya..

Hasil observasi terdahulu masih cukup memiliki perbedaan, sehingga observasi ini masih menarik untuk dilakukan. Perbedaan mendasar observasi ini dengan observasi milik (Farida et al., 2020) yang mana menganalisis “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian Persepsi Perilaku terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak” di mana penulis sebelumnya menggunakan responden para pembayar pajak orang pribadi yang tercatat di kantor pelayanan pajak, sedangkan observasi ini penulis menggunakan responden para pembayar pajak orang pribadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Terdapat tambahan variabel kewajiban moral yang mana dianggap penting karena pembayar pajak yang memiliki pandangan dimana membayar pajak dapat memberikan faedah serta menganggap bahwa pajak itu sebagai suatu keseharusan maka akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan pembayar pajak dalam melakukan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, pengkajian selanjutnya akan fokus pada komponen yang memberikan dampak ketaatan para pembayar pajak di wilayah Semarang terutama kalangan UMKM. Ketaatan wajib pajak adalah komponen yang sangat krusial untuk menambah kekayaan negara, maka harus ada pengkajian terkait komponen yang mempengaruhi terjadinya kepatuhan pembayar pajak diantaranya; sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku dan kewajiban moral. Bersumber pada latar belakang yang dideskripsikan, maka peneliti mengangkat judul pengkajian **“Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian Persepsi Perilaku dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya (Studi Pada UMKM Wilayah Semarang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi di atas, masalah dalam pengkajian ini adalah kurangnya ketaatan para pembayar pajak yang mana memiliki peranan krusial



dalam meningkatkan pendapatan negara. Dari masalah tersebut pengkaji menghubungkan komponen yang dapat mempengaruhi ketaatan pembayar pajak yaitu Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian persepsi perilaku dan Kewajiban moral. Dapat ditarik kesimpulan dimana rumusan masalah dari pengkajian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian persepsi perilaku dan Kewajiban Moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya”

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan deskripsi di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan:

1. Apakah faktor sikap berdampak terhadap kepatuhan pembayar pajak UMKM wilayah Semarang?
2. Apakah faktor norma subjektif berdampak terhadap kepatuhan pembayar pajak UMKM wilayah Semarang?
3. Apakah faktor pengendalian persepsi perilaku berdampak terhadap kepatuhan pembayar pajak UMKM wilayah Semarang?
4. Apakah faktor kewajiban moral berdampak terhadap kepatuhan pembayar pajak UMKM wilayah Semarang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Setiap pengkajian pada dasarnya memegang tujuan yang ingin dicapai. Secara umum tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

tingkat ketaatan pembayar pajak UMKM di wilayah Semarang, sedangkan tujuan khusus dari pengkajian ini yaitu:

1. Untuk melihat pengaruh sikap terhadap kepatuhan pembayar pajak UMKM wilayah Semarang.
2. Untuk melihat pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan pembayar pajak UMKM wilayah Semarang.
3. Untuk melihat pengaruh pengendalian persepsi perilaku terhadap kepatuhan pembayar pajak UMKM wilayah Semarang.
4. Untuk melihat pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan pembayar pajak UMKM wilayah Semarang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi:

1. Bagi Penulis

Sebagai komponen rancangan akademik dalam meraih gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pengkajian ini mampu memberikan variabel yang krusial dan dijadikan perhatian dalam rangka menaikkan tingkat ketaatan pembayar pajak UMKM di wilayah Semarang untuk melakukan pembayaran kewajibannya seperti dalam hal sikap, norma subjektif, pengendalian perilaku dan kewajiban moral.

### 3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan pengkajian ini dapat dijadikan anjuran kepada DJP tentang penyebab wajib pajak di kalangan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan sehingga dapat membuat wajib pajak lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

### 4. Bagi UMKM

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama kalangan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu yang di mana merupakan wujud kontribusi terhadap negara.

### 5. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kalangan UMKM wilayah Semarang.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Akuntansi Keperilakuan**

Teori akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) ialah suatu cabang akuntansi yang mempelajari suatu hubungan antara kepribadian manusia dengan skema akuntansi, serta format sosial dari suatu konfigurasi yang dimana manusia dan skema akuntansi tersebut berada. Akuntansi keperilakuan juga dapat dikatakan sebagai bidang yang mempelajari aspek manusia dan akuntansi (*human factor of accounting*).

Akuntansi cukup memiliki peran dalam memanifestasikan informasi yang bersifat keuangan maupun lainnya yang dapat digunakan oleh siapapun yang berkepentingan dalam operasi pengambilan langkah bisnis. Akuntansi sendiri berasal dari skema kepribadian manusia, akuntansi keperilakuan dapat diinterpretasikan sebagai ilmu akuntansi yang mengimplikasikan kepribadian manusia dalam proses mengambil suatu keputusan (Lubis arfan, 2014).

Dalam sektor perpajakan Akuntansi keperilakuan mempunyai peran yang cukup penting karena aspek keperilakuan sendiri menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pelaksanaan perpajakan. Perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajibannya juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Oleh sebab itu, aspek keperilakuan menjadi sesuatu yang cukup harus dijadikan pertimbangan dalam melihat kepatuhan para pembayar pajak.

Adapun faktor-faktor psikologis, sosiologis yang relevan dengan akuntansi keperilakuan:

1. Sikap, merupakan suatu keadaan yang mana seorang individu menanggapi suatu objek, gagasan maupun situasi yang ada. Sikap dibentuk melalui pengalaman pribadi dan lingkungan, sikap sendiri dapat membentuk kebiasaan yang konsisten dilakukan pada seorang individu seperti sikap yang dimiliki pembayar pajak dalam merespon aturan perpajakan akan berbeda pada setiap orang.
2. Motivasi, merupakan suatu proses menentukan intensitas, arah, dan tekun atau tidaknya seorang individu dalam usaha mencapai suatu target.
3. Persepsi atau opini, merupakan keyakinan seseorang terhadap suatu peristiwa, objek maupun manusia. Opini merupakan komponen dari sikap yang terdapat hubungan tentang bagaimana seorang individu memberikan penilaian terhadap sesuatu seperti bagaimana memaknai perpajakan sehingga mempengaruhi perilakunya.

Akuntansi keperilakuan berasal dari interaksi sosial, meliputi interaksi saat manusia melakukan transaksi perdagangan (akuntansi keuangan), transaksi dengan pemerintah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan (akuntansi perpajakan), interaksi antara pemerintah dan regulasi (akuntansi sektor publik), dan interaksi para manajer melalui penggunaan informasi keuangan (akuntansi manajemen) (Kamayanti, 2018). Jika akuntansi berasal dari interaksi, dan interaksi merupakan suatu bentuk perilaku maka semua akuntansi ialah akuntansi keperilakuan dan semua akuntansi keperilakuan ialah akuntansi.

Relevansi dari teori akuntansi perilaku dengan observasi ini ialah kepribadian loyal atau tidak loyal seorang pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kepribadian manusia itu sendiri. Apabila pembayar pajak memiliki perilaku untuk patuh terhadap perpajakan maka akan menimbulkan kepatuhan pajak, dimana perilaku tersebut ditentukan oleh sikap yaitu ketika pembayar pajak memiliki tindakan baik yang dapat menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Dalam arti lain tendensius atau tidak tendensius terhadap sesuatu, gagasan maupun situasi tertentu yang berkaitan dengan perpajakan.

### 2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

*Theory Planned Behaviour* mengkualifikasikan dimana kepribadian terbentuk karena adanya sebuah niat. Teori ini merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai kepribadian manusia dengan presumsi bahwa manusia secara sadar meninjau segala informasi. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward The Behaviour*), Norma Subjektif (*Subjective Norm*), dan pengendalian persepsi perilaku (*Perceived Behavioural Control*).

Menurut *Theory of Planned Behavior* (D. Lesmana et al., 2017), kepribadian seorang individu dilihat berdasarkan 3 jenis klasifikasi yaitu:

1. *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), yang merupakan keseriusan mengenai mungkin atau tidaknya hasil dari perilaku dan penilaian yang didapatkan dari hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).

Keseriusan kepribadian ini memanifestasikan sikap terhadap perilaku itu sendiri mengenai elok tidaknya sesuatu yang dilaksanakan;

2. *Normative beliefs* (keyakinan normatif), yang merupakan keseriusan mengenai intensi normatif dari individu lain yang dapat memotivasi untuk menyempurnakan sebuah keinginan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), intensi normatif dapat membuahkan desakan sosial yang di rasakan (*subjective norm*); dan
3. *Control beliefs* (keyakinan kontrol) yang merupakan keseriusan mengenai suatu elemen yang dapat memberikan fasilitas atau menghalangi kepribadian yang akan dimanifestasikan (*control beliefs*) dan impresi seseorang terkait kuat atau tidaknya faktor tersebut (*perceived power*), keseriusan kontrol ini menyebabkan adanya pengendalian persepsi perilaku.

*Theory of Planned Behavior* memproyeksikan suatu tingkah laku dapat dicermati berdasarkan sikap terhadap perilakunya dan dalam menakar norma subjektif serta menyelidiki kontrol perilaku harus melihat kondisi sikap dan impresi individu tersebut. Teori ini didasarkan atas pemikiran dimana manusia ialah makhluk logis dan memakai informasi yang potensial bagi dirinya, secara terstruktur. Individu akan merefleksikan akibat yang didapatkan dari aksi yang mereka lakukan sebelum memutuskan untuk menunaikan atau tidak menunaikan kepribadian tertentu (A. L. Lesmana & Setyadi, 2020).

Dalam penelitian (Samudra et al., 2020) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:

1. Sikap ialah kepribadian yang mana merujuk pada anggapan berpihak (*favorableness*) atau dapat juga menjadi perasaan tidak berpihak (*unfavorableness*) tertuju pada suatu hal tertentu yang mana akan di sikapi dan lahir dari adanya penilaian individual atas kesungguhan terhadap hasil yang kemudian akan tampak dari kepribadian yang dikerjakan.
2. Norma subjektif merujuk tentang bagaimana seseorang memiliki penanggulangan sosial atas dirinya agar dapat menghindari hal yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah ada.
3. Pengendalian persepsi perilaku merujuk pada persepsi seseorang mengenai mudah atau tidaknya dalam melakukan suatu kepribadian dengan presumsi untuk melihat pada pengalaman di masa lampau seperti gangguan maupun kesulitan yang mungkin dapat diatasi. Kontrol perilaku ini sendiri merujuk pada paham tidaknya individu dalam merasakan bahwa kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Lazimnya, semakin berpihak suatu sikap dan norma subjektif terhadap kepribadian, maka semakin dominan pula seorang individu mempertimbangkan kegiatannya terkait dengan melaksanakan suatu perilaku.

Relevansi *theory of planned of behavior* dengan observasi ini ialah kepribadian taat atau tidak taatnya seorang pembayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya didorong oleh kepribadian yang dimiliki oleh pembayar pajak itu sendiri. Bilamana pembayar pajak memiliki perilaku untuk taat terhadap perpajakan maka akan menimbulkan kepatuhan terhadap kewajibannya, dimana



perilaku tersebut ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan pengendalian persepsi perilaku.

### **2.1.3 Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan teori yang merujuk pada pemahaman terkait anggapan seorang individu terhadap insiden yang terjadi diseputar mereka dengan mengetahui argumentasi mereka atas kejadian yang dialami, teori ini berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu yang mana dapat diketahui perilaku seseorang hanya dengan melihat karakter orang tersebut.

Teori atribusi milik Kritz Heider pada tahun 1958 yang memberikan argumentasi bahwa perilaku seorang individu didasarkan atas kombinasi kekuatan internal, yaitu yang bersumber dari diri seorang individu dan kekuatan eksternal yang berasal dari luar diri seorang individu (Wahyuni & Amin, 2021). Jika dikaitkan dengan kepatuhan pembayar pajak, teori atribusi ini menjelaskan sikap pembayar pajak dalam memberikan penaksiran terhadap kewajibannya sendiri.

Teori atribusi pada esensinya memberitahukan dimana jika individu memperhatikan kepribadian individu lain maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah itu tampak secara internal atau eksternal dimana kepribadian internal berada dibawah kendali individu itu sendiri dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh oleh orang lain, sedangkan perilaku eksternal dapat terjadi ketika seorang individu melakukan suatu perilaku secara paksa karena mengikuti situasi atau pengaruh sosial dari lingkungan luar. Teori ini pada dasarnya memastikan apakah perilaku yang terjadi ditimbulkan secara internal atau eksternal, namun

esensinya penentuan tersebut dapat dilihat dari tiga elemen yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi (Awaluddin & Sukmawati, 2017).

Dalam penelitian (Sudirman et al., 2020) dijelaskan terkait tiga faktor penentu apakah perilaku yang dilakukan tergolong internal atau eksternal, tiga elemen tersebut yaitu:

1. Konsensus

Konsensus yaitu di mana seluruh khalayak memiliki kesamaan ideologi dalam hal merespon suatu kepribadian dalam suasana kondisi yang sama. Bilamana konsensus mengalami kenaikan maka tergolong atribusi internal, sebaliknya jika konsensus mengalami penurunan maka tergolong atribusi eksternal.

2. Konsistensi

Konsistensi yaitu apabila setiap kepribadian yang dikerjakan dengan kepribadian sebelumnya menunjukkan pada reaksi (sedikit atau banyaknya konsensus yang diterima), maka akan makin kuat praduga kepribadian konsisten dari individu tersebut jika konsensus secara bersamaan mengalami kenaikan atau secara bersamaan mengalami penurunan dengan perilaku sebelumnya. Namun apabila konsensus individu tersebut berbeda derajat tinggi rendahnya maka konsistensinya menurun.

3. Kekhususan

Kekhususan yaitu seseorang akan memberikan tanggapan terkait kepribadian individu lain secara berbeda dalam keadaan yang tidak

sejalan. Bilamana perilaku seorang individu dipandang sebagai hal yang istimewa, maka individu lain akan bertindak untuk mengamati serta akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut, sedangkan apabila hal tersebut dipandang sebagai hal yang alami maka akan dianggap sebagai atribusi internal.

Keputusan untuk taat ataupun tidak taat terhadap perpajakan berasal dari individual itu sendiri, tingkat ketaatan membayar pajak akan makin tinggi ketika pembayar pajak mempunyai moralitas yang lebih stabil (Sudirman et al., 2020).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini ialah menjelaskan penyebab internal yang mempengaruhi perilaku pembayar pajak yaitu karakter individu yang dimilikinya. Dimana karakteristik pembayar pajak yang bermacam-macam dan dengan lingkungan yang berbeda-beda pula, maka diperlukan adanya kontrol moral atas perilaku terkait kewajiban membayar pajak sesuai dengan metode aturan yang sah.

#### **2.1.4 Pajak**

UU No 16 Tahun 2009 tentang KUP memberikan interpretasi yang mana pajak merupakan iuran untuk diberikan kepada negara yang masih harus dibayar oleh pembayar pajak yang bersifat wajib menurut konstitusi, tanpa memperoleh balasan secara langsung dan akan dipakai untuk kebutuhan sebuah negara guna mencapai kesejahteraan rakyat (Sudirman et al., 2020).

Pajak merupakan iuran yang menjadi pungutan oleh negara terhadap warganya dengan berdasar pada norma-norma hukum yang akan dipakai untuk

pendanaan terhadap pengeluaran negara guna menutup biaya produksi dan jasa serta pengelolaan fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh warga negaranya sendiri agar mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan umum (karolina & Noviani, 2019). Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan ialah:

*“Kontribusi yang wajib dan masih harus dibayar oleh pembayar pajak baik orang pribadi maupun badan untuk diberikan kepada negara yang memaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat hasil kembali secara langsung yang di mana hasil pajak akan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan”.*

Bersumber pada beberapa interpretasi di atas, dapat diambil kesimpulan yang mana pajak ialah partisipasi keharusan warga negara berupa materi atau komoditas yang masih harus dibayar pihak pembayar pajak yang dapat mengikat dan sinkron dengan ketentuan aturan yang tidak akan mendapatkan kompensasi langsung namun peranannya demi menyelenggarakan pemerintahan serta untuk kepentingan umum.

Ketetapan umum dan prosedur perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu:

1. Wajib pajak

Pembayar pajak sendiri terdiri dari individu maupun perhimpunan, termasuk pembayar pajak, penarikan pajak, dan pengambil pajak, yang diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan prosedur

perpajakan. Dengan begitu pembayar pajak dikategorikan menjadi dua yakni pembayar pajak individu dan pembayar pajak perhimpunan, yang mana pembayar pajak individu meliputi para pelaku usaha maupun yang tidak memiliki usaha, sedangkan perhimpunan terdiri dari perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau dengan formasi lain termasuk perusahaan, perserikatan, yayasan, dan lainnya.

## 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP ialah nomor identitas seorang pembayar pajak yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan sehingga pembayar pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya.

## 3. Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT ialah korespondensi yang digunakan para pembayar pajak dalam rangka memberitakan kalkulasi atau penyetoran pajak meliputi harta atau komoditas lainnya sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan. Jenisnya itu sendiri terpecah menjadi dua yakni SPT masa dan SPT tahunan, yang mana SPT masa merupakan rekognisi untuk setiap bulan, sedangkan SPT tahunan merupakan rekognisi untuk suatu tahun pajak.

### **2.1.5 Kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan menggambarkan perilaku menurut atau taat kepada pemerintah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dimana berasal dari pribadi seorang individu dalam menyempurnakan keperluan yang ingin dicapai (Samudra et al.,

2020). Sehingga makna kepatuhan perpajakan sendiri yaitu sebagai suatu kondisi dimana pembayar pajak menyempurnakan kewajibannya.

Kepatuhan para pembayar pajak dapat juga diartikan sebagai kepatuhan pembayar pajak dalam melakukan pendaftaran diri, menyerahkan kembali melalui surat pemberitahuan (SPT), ketaatan dalam melakukan kalkulasi iuran yang masih harus dibayar kepada negara serta ketaatan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan sendiri terperinci menjadi dua yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal ialah pembayar pajak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, namun bisa saja belum memenuhi ketentuan material. Sedangkan kepatuhan material ialah pembayar pajak melakukan kewajibannya seperti melakukan kalkulasi secara akurat dan sinkron dengan ketentuan yang ada serta menginformasikan kepada pihak KPP sebelum tempo yang ditetapkan (Sudirman et al., 2020).

Kepatuhan pajak dapat dilanggar ketika pembayar pajak melakukan penyingkiran pajak yang dilakukan secara legal atau tanpa menentang ketentuan tetapi melakukan pengurangan jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan menggunakan kelemahan peraturan, pembayar pajak berniat tidak melaporkan kekayaannya di mana ini bersifat ilegal, kemudian pembayar pajak tidak mampu melakukan kewajiban perpajakannya sehingga terjadi penunggakan dalam pembayaran. Hal ini mengakibatkan penyetoran dana kepada kas negara menjadi berkurang, maka dari itu dibutuhkan peningkatan kepatuhan perpajakan agar kebutuhan negara tercukupi guna mencapai kepentingan bersama.

Menurut ketetapan kabinet keuangan No.544/KMK.04/2000 parameter pembayar pajak yang taat terhadap kewajiban perpajakannya yakni:

1. selama 2 (dua) tahun belakang pembayar pajak tidak boleh terlambat dalam melaporkan korespondensi untuk seluruh kategori pajak;
2. seluruh kategori pajak tidak boleh dalam masa tunggakan melainkan memperoleh persetujuan ketika melakukan angsuran dalam penyelesaian;
3. selama tempo 10 (sepuluh) tahun belakang pembayar pajak diharuskan tidak memiliki hukuman apapun karena melangsungkan delik di sektor perpajakan; dan
4. Laporan keuangan mendapatkan hasil audit oleh akuntan publik dengan spesifikasi wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sejauh pengecualian itu tidak mempengaruhi margin fiskal.

Kepatuhan pajak dalam observasi ini mempunyai makna keadaan dimana seorang pembayar pajak mengasosiasikan dan menyadari prosedur pembayaran pajak juga taat pada ketetapan yang berlangsung, dengan melonjaknya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan maka akan berdampak kepada tingkat ketaatan pembayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

#### **2.1.6 Sikap**

Sikap menggambarkan elemen dalam diri seorang individu yang ditelaah dengan maksud mengasung tanggapan positif maupun negatif yang absolut secara spontan oleh keteguhan yang berada pada pembayar pajak terhadap kepatuhannya di bidang perpajakan (Farida et al., 2020). Sikap positif dapat diilustrasikan

sebagai tendensi perbuatan yang mengarah atau menantikan suatu entitas, sedangkan sikap negatif diilustrasikan sebagai tendensi perbuatan yang mengarah pada meleraikan, mengelakkan ataupun tidak meminati entitas tertentu.

Dalam penelitian (Awaluddin & Sukmawati, 2017) menjelaskan bahwa sikap ialah presumsi atau pandangan seorang individu dalam menampung suatu entitas, buah pikiran, kondisi, ataupun kualitas. Sikap sendiri bukan hanya kepribadian melainkan tendensi untuk melakukan tabiat dengan ragam tertentu terhadap suatu entitas sikap, entitas sikap dapat meliputi individu, kawasan, buah pikiran maupun kondisi. Dengan begitu sikap dapat diartikan sebagai reaksi sepakat maupun tidak sepakat terhadap suatu entitas yang hendak disikapi.

Sikap menggambarkan siasat yang berada pada seorang individu dalam pendirian personalitas, di mana personalitas itu sendiri merujuk pada filsafat jiwa seseorang. Sedangkan sikap yang meresap pada seorang individu dapat tergantikan dengan bagaimana dia dipengaruhi oleh kawasan sekitarnya. Bilamana seorang individu pada kondisi berbaaur dengan individu lain yang memiliki sikap yang berlainan dan diterapkan secara berkesinambungan, maka tidak menutup kemungkinan individu tersebut secara impulsif menuai jika sikapnya bertukar menirukan lingkungannya.

### **2.1.7 Norma Subjektif**

Norma subjektif ialah keseriusan yang tumbuh dalam diri seorang individu terhadap standar tumpuan orang lain yang dijadikan penunjuk oleh individu itu sendiri. Kepatuhan seorang pembayar pajak dapat diimpresikan oleh seseorang



atau komunitas lain. Seorang pembayar pajak akan meninjau dampak dari individu lain terhadap dirinya sendiri yang berkaitan dengan ketetapan untuk menurut atau tidak menurut mengenai hukum perpajakan (karolina & Noviari, 2019).

Norma subjektif menggambarkan keseriusan dari seseorang seperti keluarga dekat, teman, mitra kerja, dan masyarakat yang dapat mempengaruhi presumsi seseorang terhadap tumpuan yang dimiliki individu lain dan dapat memberi dampak terhadap minat untuk menjalankan maupun tidak menjalankan perbuatan yang lagi dijadikan pertimbangan (Sudirman et al., 2020).

Norma subjektif dapat dikatakan sebagai presumsi seseorang tentang imbas sosial yang dikonstruksikan dalam membentuk kepribadian tertentu, perihal ini sendiri dianggap penting karena pandangan orang lain mampu memberikan presumsi yang mana seorang pembayar pajak dalam berkepribadian tunduk maupun tidak tunduk terhadap kewajibannya.

#### **2.1.8 Persepsi pengendalian perilaku**

Persepsi pengendalian perilaku menggambarkan presumsi dari jenjang kesukaran dalam melaksanakan suatu kepribadian yang di dapat dari kemahiran lampau dan estimasi individu mengenai mudah tidaknya menjalankan kepribadian tersebut (Samudra et al., 2020). Sedangkan menurut (Tarmidi & Nurlita, 2018) pengendalian persepsi perilaku merupakan kontrol dari luar yang diyakini akan membendung seseorang dalam melakukan perbuatan taat pajak, karena makin

banyak pemantauan maka makin kuat kuantitas dalam melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi pengendalian yang realistis.

Dalam penelitian (Farida et al., 2020) menjelaskan bahwa pengendalian persepsi perilaku menjadi penentu penting dari perilaku yang dilakukan seorang individu, hal ini termasuk mudah tidaknya yang dialami oleh seseorang tersebut dalam melakukan sebuah perilaku. Menurut (Samudra et al., 2020) menyatakan bahwa pengendalian persepsi perilaku ialah presumsi individu tentang kemahiran lampau dan estimasi dalam melakukan suatu perilaku dapat dilihat dari profesionalisme terkait dengan sulit atau mudahnya menjalankan suatu perilaku.

Pengendalian Persepsi Perilaku dalam kerangka perpajakan ialah kuat tidaknya kendali seorang individu dalam menampakkan perilaku tertentu, seperti menginformasikan kalkulasi kekayaan yang sebenarnya, melakukan penyelewengan terkait kalkulasi biaya yang seharusnya tidak dapat dilakukan pengurangan, serta aktivitas lainnya yang merefleksikan ketidakpatuhan pembayar pajak.

### **2.1.9 Kewajiban moral**

Kewajiban moral yakni etika pribadi yang tertanam pada seseorang namun bisa saja tidak ada pada individu lain seperti hakikat hidup, rasa bersalah, dan juga secara sukarela melakukan kewajiban perpajakan (Mitha Pratiwi & Merkusiwati, 2019). Sedangkan menurut (Ramadhan, 2017) moralitas pajak merupakan konstruksi keikutsertaan masyarakat terkait tumpuan terhadap perpajakan, para pembayar pajak dapat taat dalam membayar kewajibannya

mungkin terjadi ketika didorong oleh sikap peduli dengan kondisi keuangan negara.

Dalam penelitian (Noermansyah & Aslamadin, 2019) menyatakan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran mengenai keberadaannya sebagai warga negara yang harus menjunjung tinggi aturan perundang-undangan, dengan adanya kewajiban moral, maka akan mendorong seorang individu agar memiliki kepatuhan terhadap perpajakan.

Pembayar pajak dengan kaidah moral yang bagus akan makin taat terhadap perpajakan dan mampu menaikkan kepatuhan itu sendiri. Pembayar pajak dengan memanfaatkan filsafat moral dalam pertimbangan keputusan terkait pembayaran pajak akan lebih taat dari pada pembayar pajak lainnya. Oleh karena itu, pembayar pajak yang memiliki cara pandang positif terhadap perpajakan serta memandang jika pajak itu merupakan suatu keseharusan akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan pembayar pajak dalam melakukan kewajibannya di dunia perpajakan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Observasi terdahulu di jadikan rujukan penulis dalam mengkaji Penelitian yang di mana penulis dapat menambah khazanah filosofi yang akan diambil peranannya dalam mengkaji sebuah penelitian mengenai pengaruh sikap, norma subjektif, Pengendalian persepsi perilaku dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut:

### 2.2.1 Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap sendiri menggambarkan keyakinan pembayar pajak terhadap perilaku kepatuhan dapat berbentuk reaksi dukungan atau memihak dapat pula berbentuk reaksi tidak memihak pada suatu objek (Maharriffyan & Oktaviani, 2021). Dalam penelitian ini terdapat pemaparan mengenai pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertumpu pada penelitian yang telah dilakukan pada observasi terdahulu menyatakan bahwa terdapat disimilaritas pada hasil penelitian yang mana digambarkan pada susunan tabulasi dibawah ini.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Peneliti	Tahun	Hasil	Metode Analisis
1.	Dida Farida Latipatul Hamdah, Rinrin Raini Rahmadya, dan Lina Nurlaela.	(2020)	Sikap memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
2.	Teddy Briand Samudra, Maslihach, dan Dwiyani Sudaryanti.	(2020)	Sikap memberikan dampak signifikan terhadap Kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
3.	Made Wahyuni, Ni Luh Gede Emi Sulindawati, dan I Nyoman	(2017)	Sikap memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak.	Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan

	Putra Yasa.			program SmartPLS.
4.	Asrofi Langgeng Noermansyah dan Ibnun Aslamadin.	(2019)	Sikap tidak memberikan dampak terhadap niat ketidakpatuhan para pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
5.	Desy Lesmana, Delfi Panjaitan, dan Mutiara Maimunah.	(2017)	variabel sikap tidak memberikan dampak niat untuk patuh terhadap para pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.

### 2.2.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Norma subjektif sendiri menggambarkan keyakinan dari seorang individu seperti keluarga dekat, teman, mitra kerja, dan masyarakat yang dapat mempengaruhi presumsi seseorang terhadap tumpuan yang dimiliki orang lain (Saputra, 2019). Dalam penelitian ini terdapat pemaparan mengenai pengaruh Norma Subjektif terhadap kepatuhan pembayar pajak. Bertumpu pada penelitian yang telah dilakukan pada observasi terdahulu menyatakan bahwa terdapat disimilaritas pada hasil penelitian yang mana digambarkan pada susunan tabulasi dibawah ini.

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Peneliti	Tahun	Hasil	Metode Analisis
1.	Siti Rahma Sudirman, Darwis Lannai, dan Hajering.	(2020)	Norma subjektif memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan	Analisis regresi linear berganda.

			pembayar pajak.	
2.	Monika Karolina, dan Naniek Noviani	(2019)	Norma Subjektif memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
3.	Teddy Briand Samudra, Maslihach, dan Dwiyani Sudaryanti.	(2020)	Norma Subjektif memberikan dampak signifikan terhadap Kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
4.	Desy Lesmana, Delfi Panjaitan, dan Mutiara Maimunah.	(2017)	Norma Subjektif tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
5.	Rachmawati Meita Oktaviani, dan Ida Nurhayati.	(2015)	Norma Subjektif tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.

### 2.2.3 Pengaruh Pengendalian persepsi perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi pengendalian perilaku menggambarkan presumsi dari jenjang kesukaran dalam melaksanakan suatu kepribadian yang di dapat dari kemahiran lampau dan estimasi individu mengenai mudah tidaknya menunjukkan perilaku taat (Putri & Subandi, 2017). Dalam penelitian ini terdapat pemaparan mengenai pengaruh pengendalian persepsi perilaku terhadap kepatuhan pembayar pajak. Bertumpu pada penelitian yang telah dilakukan pada observasi terdahulu

menyatakan bahwa terdapat disimilaritas pada hasil penelitian yang mana digambarkan pada susunan tabulasi dibawah ini.

**Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Pengendalian persepsi perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Peneliti	Tahun	Hasil	Metode Analisis
1.	Dida Farida Latipatul Hamdah, Rinrin Raini Rahmadya, dan Lina Nurlaela.	(2020)	Pengendalian persepsi perilaku memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
2.	Teddy Briand Samudra, Maslihach, dan Dwiyani Sudaryanti.	(2020)	Pengendalian persepsi perilaku memberikan dampak signifikan terhadap Kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
3.	Pricillia V.E Kawengian, Harjianto Sabijono, dan Novi S. Budiarmo.	(2017)	Pengendalian persepsi perilaku tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
4.	Asrofi Langgeng Noermansyah dan Ibnun Aslamadin.	(2019)	Pengendalian persepsi Perilaku tidak memberikan dampak terhadap niat ketidakpatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
5.	Desy Lesmana, Delfi Panjaitan, dan Mutiara Maimunah.	(2017)	Pengendalian persepsi perilaku memberikan dampak niat untuk patuh terhadap pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.

### 2.2.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral yakni etika pribadi yang tertanam pada seseorang namun bisa saja tidak ada pada individu lain seperti hakikat hidup, rasa bersalah, dan juga secara sukarela melakukan kewajiban perpajakan (Sanjaya, 2014). Dalam penelitian ini terdapat pemaparan mengenai pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan pembayar pajak. Bertumpu pada penelitian yang telah dilakukan pada observasi terdahulu menyatakan bahwa terdapat disimilaritas pada hasil penelitian yang mana digambarkan pada susunan tabulasi dibawah ini.

**Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Peneliti	Tahun	Hasil	Metode Analisis
1.	Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra, dan Fitriani Mansur.	(2018)	Kewajiban Moral memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak	Analisis regresi linear berganda.
2.	Pricillia V.E Kawengian, Harjianto Sabijono, dan Novi S. Budiarmo.	(2017)	Kewajiban Moral memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.
3.	Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi.	(2020)	Moralitas memberikan dampak terhadap Kepatuhan pembayar pajak.	Model persamaan struktural (SEM)
4.	Luqman Yusuf Ramadhan.	(2017)	Moralitas Pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak.	Analisis regresi linear berganda.



5.	Asrofi Langgeng Noermansyah dan Ibnun Aslamadin.	(2019)	Kewajiban Moral tidak memberikan dampak terhadap niat ketidakpatuhan pembayarannya.	Analisis regresi linear berganda.
----	--	--------	---	-----------------------------------

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang

Sikap mengenai kepatuhan pembayar pajak terbentuk oleh keyakinan pembayar pajak itu sendiri yang melingkupi seluruh hal yang secara serius dirasakan pembayar pajak terkait implementasi prinsip perpajakan. Keyakinan pembayar pajak terkait kepribadian taat ini akan membentuk sikap terhadap ketaatan pembayarannya baik secara positif maupun negatif, yang kemudian akan membangun kepatuhan pembayar pajak dalam berlaku taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pada teori akuntansi berperilaku dan *theory of planned behavior* pembayar pajak memiliki kepribadian untuk taat terhadap perpajakan ketika pembayar pajak memiliki tindakan yang dapat menguntungkan terhadap suatu objek. Dalam arti lain, sikap bukan hanya kepribadian melainkan tendensi untuk melakukan tabiat dengan ragam tertentu terhadap suatu entitas sikap, entitas sikap dapat meliputi individu, kawasan, buah pikiran maupun kondisi. Dengan begitu sikap dapat diartikan sebagai reaksi sepakat maupun tidak sepakat terhadap suatu entitas yang hendak disikapi.

Dalam observasi (Farida et al., 2020) menunjukkan bahwa sikap memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak, begitu pula dengan observasi (Yustikasari et al., 2020) yang menyatakan bahwa sikap memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, dikembangkan hipotesis yakni:

H<sub>1</sub>: Sikap berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

### **2.3.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang**

Norma Subjektif ialah fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu terhadap orang di sekitarnya seperti keluarga maupun rekan kerja yang menyetujui sebuah kepribadian tertentu dan mampu menstimulasi individu tersebut untuk mentaati mereka (Awaluddin & Sukmawati, 2017). Berdasarkan *theory of planned behavior* pembayar pajak dikatakan patuh ketika memiliki kendali sosial atau keyakinan normatif terhadap suatu perilaku. Menurut penelitian (Samudra et al., 2020) menunjukkan dimana norma subjektif memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak. Dalam observasi (Sudirman et al., 2020) menunjukkan dimana norma subjektif juga memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, dikembangkan hipotesis yakni:

H<sub>2</sub>: Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

### **2.3.3 Pengaruh Pengendalian persepsi perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang**

Pengendalian persepsi perilaku ialah mudah tidaknya merealisasikan suatu perilaku, kendali kepribadian yang dirasakan ditentukan oleh kemahiran lampau terhadap kehidupan termasuk persoalan yang dihadapi seperti harta, kepiawaian, dan durasi (Kamela, 2020). Berdasarkan *theory of planned behavior* pembayar pajak dikatakan patuh ketika melakukan kegiatan sesuai kehendaknya sendiri dan memiliki keyakinan terkait adanya suatu aspek yang memberikan fasilitas dalam memunculkan perilaku patuh maupun menghalangi perilaku yang akan ditampilkan. Dalam observasi (Samudra et al., 2020) menunjukkan dimana pengendalian persepsi perilaku memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak. Dalam observasi (Farida et al., 2020) di mana hasilnya juga menunjukkan kontrol perilaku memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, dikembangkan hipotesis yakni:

H<sub>3</sub>: Pengendalian persepsi perilaku berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

### **2.3.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.**

Moralitas ialah pelaksanaan suatu kewajiban karena memiliki rasa hormat kepada hukum yang berlaku, sedangkan hukum itu sendiri berada dalam hati manusia yang mana merupakan ciri khas manusia yang tidak dapat ditentukan pada makhluk di bawah tingkat manusia, terdapat dua kategori moral dalam dunia perpajakan yakni kewajiban perpajakan ialah moralitas yang harus diadakan oleh

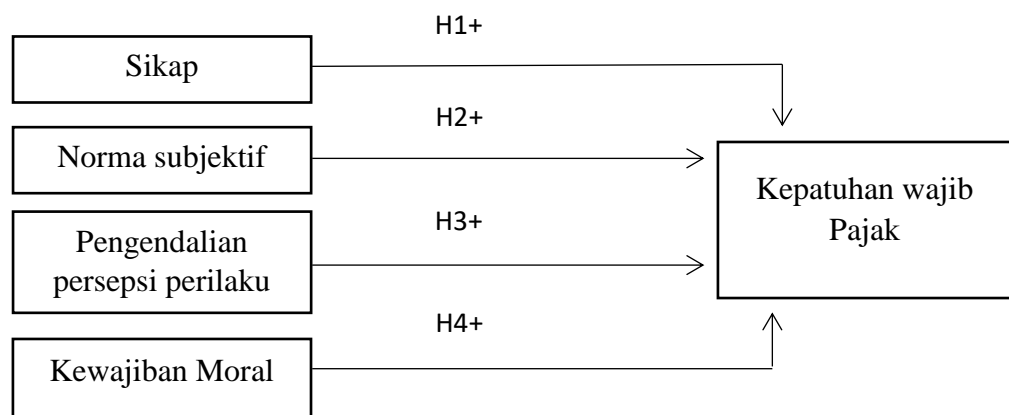
setiap pembayar pajak dan melibatkan kesadaran moral terkait distribusi rekognisi pajak (A. L. Lesmana & Setyadi, 2020). Berdasarkan teori atribusi kepatuhan pembayar pajak dapat dilihat melalui internal seorang individu yang mana keputusan untuk taat terhadap perpajakan berasal dari individual itu sendiri, tingkat kepatuhan akan makin produktif ketika pembayar pajak memiliki moral yang lebih terampil. Dalam observasi (Ruky et al., 2018) menunjukkan dimana kewajiban moral memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak, begitu juga dengan observasi (Hirani & Silalahi, 2020) dimana menunjukkan kewajiban moral memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayar pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, dikembangkan hipotesis yakni:

H<sub>4</sub>: Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

#### 2.4 Model Penelitian

Observasi ini memakai variabel (independen) yakni Sikap (X<sub>1</sub>), Norma Subjektif (X<sub>2</sub>), Pengendalian persepsi perilaku (X<sub>3</sub>), dan Kewajiban Moral (X<sub>4</sub>), sedangkan variabel (dependen) yakni Kepatuhan Wajib pajak (Y).

**Gambar 2. 1 Model penelitian**



## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Jenis observasi yang digunakan ialah kuantitatif asosiasi kausal yang mana observasi ini menuju pada menyelidiki afiliasi antara variabel (Habibie, 2017). Dalam observasi ini asosiasi yang terbentuk yakni asosiasi kausal yang mana mencari peranan, pengaruh dan hubungan yang bersifat sebab-akibat dari suatu variabel. Observasi asosiasi kausal mencari hubungan yang tampak antara variabel independen yakni, sikap (X1), Norma Subjektif (X2), Pengendalian persepsi perilaku (X3), dan Kewajiban Moral (X4) terhadap variabel dependen yakni Kepatuhan pembayar Pajak (Y). Pendekatan kuantitatif dipilih dalam mengerjakan observasi ini karena nantinya observasi ini akan bersinggungan dengan pengerjaan data angka dan akhirnya akan dilakukannya telaah statistik.

Observasi ini menguraikan mengenai asosiasi antara dua variabel yakni independen dan dependen yang digunakan untuk mengerjakan hipotesis yang ada. Tujuan observasi ini ialah untuk menemukan fakta lapangan, dan menelaah pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian persepsi perilaku, dan Kewajiban moral terhadap Kepatuhan pembayar Pajak UMKM. Data primer dijadikan sumber dalam pengumpulan fakta lapangan yang mana merupakan sumber data langsung didapatkan dengan upaya membagi kuesioner kepada responden yakni wajib pajak UMKM di wilayah Semarang.

### 3.2 Populasi

Populasi menggambarkan mandala yang terpecah menjadi objek atau subjek yang kemudian digunakan oleh penelaah untuk dieksplorasi lebih jauh dan diambil hasilnya dengan keunikan dan keistimewaan tertentu (Samudra et al., 2020). Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdomisili di wilayah Semarang, Jawa Tengah dijadikan sebagai target observasi penelaah dalam melakukan pengerjaannya.

### 3.3 Sampel

Para pengusaha UMKM yang bertempat di wilayah Semarang, Jawa Tengah dijadikan sebagai target observasi dengan model membagikan 100 kuesioner kepada para penjawab yang kemudian akan diberikan kembali pada penelaah untuk dijadikan tumpuan dalam penggarapan data statistik.

Berlandaskan pada data Dinas Koperasi dan UMKM Wilayah Semarang hingga akhir 2021 menyebutkan bahwa UMKM terdaftar di wilayah Semarang berjumlah 22.226, maka dilakukannya kalkulasi dengan penggunaan rumus slovin sehingga pengumpulan spesimen dalam observasi ini akan lebih akurat.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus slovin (Ruky et al., 2018).

Perhitungan:

$$n = \frac{22.226}{1 + 22.226(0,10)^2}$$

$$n = \frac{22.226}{223,26} = 99,5 \rightarrow 100$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (10%)

*Purposive random sampling* digunakan sebagai teknik pengumpulan sampel, yang mana menggambarkan metode penentuan sampel dengan melihat standar tertentu (Sugiyono, 2017). Tujuan penggunaan *purposive sampling* ialah untuk menentukan sampel sebuah observasi yang memang membutuhkan standar tertentu yang diambil sesuai dengan sasaran observasi. Adapun standar sampel yang digunakan yakni:

1. Para pelaku UMKM sudah harus memadai standar dengan kepemilikan NPWP; dan
2. Para pelaku UMKM di Wilayah Semarang, Jawa Tengah dengan kekayaan  $\geq 500$  juta per tahun.

### 3.4 Metode pengumpulan data

Data kuantitatif dijadikan sebagai metode dalam observasi penelaah yang mana data dikelola dengan penggunaan skala numerik. Pengambilan fakta lapangan menggunakan data primer dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner sendiri mengandung susunan pertanyaan yang diberikan oleh penelaah dan harus dijawab oleh para penjawab, pertanyaan disebarakan sesuai dengan standar yakni kepada pembayar pajak UMKM wilayah Semarang.

Skala likert dijadikan tumpuan dalam penentuan jawaban para responden agar dapat membentuk angka kuantitatif yang mana selanjutnya dapat dilakukannya pengerjaan statistik (Farida et al., 2020). Skala likert memiliki peranan untuk mendapati kepribadian maupun presumsi seorang individu tentang fakta tertentu.

Pada observasi ini, penelaah menggunakan kuesioner yang memiliki kuantitas pertanyaan untuk melihat tinggi rendahnya kepatuhan para pembayar pajak UMKM di wilayah Semarang. Variabel akan ditimbang dengan melihat standar indikator bagi tiap variabel yang kemudian diberikannya skala likert, yakni:

- a) Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1;
- b) Tidak Setuju (TS) diberi skor 2;
- c) Netral (N) diberi skor 3;
- d) Setuju (S) diberi skor 4; dan
- e) Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.



### **3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian**

Observasi ini memerlukan dua struktur variabel yaitu dependen dan independen. Kepatuhan pembayar Pajak ialah variabel dependen yang diaplikasikan pada observasi ini. Sedangkan Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian persepsi perilaku, dan Kewajiban Moral dijadikan variabel independen yang diaplikasikan pada observasi ini.

#### **3.5.1 Variabel Dependen**

##### **3.5.1.1 Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)**

Kepatuhan menggambarkan kepribadian menurut atau taat kepada pemerintah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dimana berasal dari pribadi seorang individu dalam menyempurnakan keperluan yang ingin dicapai (Samudra et al., 2020). Sehingga makna kepatuhan perpajakan sendiri yaitu sebagai suatu kondisi dimana pembayar pajak menyempurnakan kewajibannya.

Kepatuhan perpajakan menggambarkan kondisi ketika para pembayar pajak mengimplementasikan serta mematuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan para pembayar pajak dapat juga diartikan sebagai kepatuhan pembayar pajak dalam melakukan pendaftaran diri, menyerahkan kembali melalui surat pemberitahuan (SPT), ketaatan dalam melakukan kalkulasi iuran yang masih harus dibayar kepada negara serta ketaatan dalam pembayaran tunggakan. Pengukuran yang akan dijadikan panduan menuju pada observasi yang dilakukan oleh (Balqis & Rusdi, 2020) yakni:

- a) Pembayar pajak mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan;

- b) Loyalitas dalam menginformasikan kembali surat pemberitahuan (SPT);
- c) Loyalitas dalam melakukan pembayaran tunggakan; dan
- d) Loyalitas dalam melakukan kalkulasi dan pemenuhan pajak secara akurat.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang paling sesuai atas pertanyaan yang diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang mana responden diminta untuk memberikan tingkat terkait setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat Tidak Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (TS) dituliskan skor 2, Netral (N) dituliskan skor 3, Setuju (S) dituliskan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 5.

### **3.5.2 Variabel Independen**

#### **3.5.2.1 Sikap**

Dalam penelitian (Awaluddin & Sukmawati, 2017) menjelaskan bahwa sikap ialah presumsi atau pandangan seorang individu dalam menampung suatu entitas, buah pikiran, kondisi, ataupun kualitas. Sikap sendiri bukan hanya kepribadian melainkan tendensi untuk melakukan tabiat dengan ragam tertentu terhadap suatu entitas sikap, entitas sikap dapat meliputi individu, kawasan, buah pikiran maupun kondisi. Dengan begitu sikap dapat diartikan sebagai reaksi sepakat maupun tidak sepakat terhadap suatu entitas yang hendak disikapi.

Sikap yang terdapat pada observasi ini tertuju pada perspektif emosi yang dimiliki para pembayar pajak UMKM Semarang yang dilihat secara spontan oleh keseriusan pembayar pajak itu sendiri terhadap kepribadian ketaatan pajak. Pengukuran yang akan dijadikan panduan menuju pada observasi yang dilakukan oleh (Habibie, 2017) yakni:

- a) Niat para pembayar pajak untuk mengkalkulasikan pemenuhan pajak tidak sesuai yang sebenarnya;
- b) Emosi para pembayar yang merasa dibebani oleh metode perpajakan;
- c) Sulitnya peraturan perpajakan; dan
- d) Banyaknya jenis pembayaran pajak.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang paling sesuai atas pertanyaan yang diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang mana responden diminta untuk memberikan tingkat setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat Tidak Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (TS) dituliskan skor 2, Netral (N) dituliskan skor 3, Setuju (S) dituliskan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 5.

### **3.5.2.2 Norma Subjektif**

Menurut (Sudirman et al., 2020) Norma subjektif menggambarkan keseriusan dari seseorang seperti keluarga dekat, teman, mitra kerja, dan

masyarakat yang dapat mempengaruhi presumsi seseorang terhadap tumpuan yang dimiliki individu lain dan dapat memberi dampak terhadap minat untuk menjalankan maupun tidak menjalankan perbuatan yang lagi dijadikan pertimbangan.

Norma subjektif pada observasi ini tertuju pada bagaimana orang disekitar lingkungan wajib pajak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak UMKM. Pengukuran yang akan dijadikan panduan menuju pada indikator yang dilakukan oleh (Balqis & Rusdi, 2020) yakni:

- a) Akibat yang muncul dari teman dan rekan profesi dalam mendorong ketaatan bayar pajak;
- b) Akibat yang muncul dari para fungsionaris pajak yang dapat mendorong ketaatan pajak; dan
- c) Akibat yang muncul dari keluarga dalam mendorong ketaatan perpajakan.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang paling sesuai atas pertanyaan yang diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang mana responden diminta untuk memberikan tingkat terkait setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat Tidak Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (TS) dituliskan skor 2, Netral

(N) dituliskan skor 3, Setuju (S) dituliskan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 5.

### 3.5.2.3 Pengendalian persepsi perilaku

Menurut (Tarmidi & Nurlita, 2018) pengendalian persepsi perilaku merupakan kontrol dari luar yang diyakini akan membendung seseorang dalam melakukan perbuatan taat pajak, karena makin banyak pemantauan maka makin kuat kuantitas dalam melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi pengendalian yang realistis.

Pengendalian persepsi perilaku yang dituju pada observasi ini ialah presumsi seorang pembayar pajak terutama UMKM mengenai kuat tidaknya kontrol diri yang mana dapat menghalangi kewajiban pembayaran sehingga dapat mematuhi kegiatan perpajakan. Pengukuran yang akan dijadikan panduan menuju pada observasi yang dilakukan oleh (Anjani & Restuti, 2016) yakni:

- a) Kemungkinan dikenai sanksi;
- b) Kemungkinan diperiksa oleh aparat pajak; dan
- c) Kemungkinan pelaporan pihak ketiga.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang paling sesuai atas pertanyaan yang diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang mana responden diminta untuk memberikan tingkat terkait setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat

Tidak Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (TS) dituliskan skor 2, Netral (N) dituliskan skor 3, Setuju (S) dituliskan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 5.

#### **3.5.2.4 Kewajiban Moral**

Menurut (Ramadhan, 2017) moralitas pajak merupakan konstruksi keikutsertaan masyarakat terkait tumpuan terhadap perpajakan, para pembayar pajak dapat taat dalam membayar kewajibannya mungkin terjadi ketika didorong oleh sikap peduli dengan kondisi keuangan negara.

Kewajiban moral dalam observasi ini tertuju pada moralitas yang dimiliki dari individu itu sendiri yang akan berhubungan dengan kepatuhan perpajakan, . Pengukuran yang akan dijadikan panduan menuju pada observasi yang dilakukan oleh (Ruky et al., 2018) yakni:

- a) Kewajiban pembelanjaan negara adalah tanggung jawab bersama;
- b) Adanya emosi khawatir bilamana tidak melakukan kewajibannya dalam dunia perpajakan;
- c) Adanya perasaan bersalah ketika melakukan hal yang berkaitan dengan tidak membayar pajak; dan
- d) Mengkalkulasikan, melunasi, serta memberitakan pajak secara tulus.

Pengukuran dilakukan dengan memakai skala ordinal beserta menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, sedangkan responden memberikan jawaban yang paling sesuai atas pertanyaan yang diberikan. Teknik skala sendiri peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suatu objek, yang

mana responden diminta untuk memberikan tingkat terkait setuju atau tidaknya terhadap masing-masing pertanyaan, dengan menuliskan skor seperti Sangat Tidak Setuju (STS) dituliskan skor 1, Tidak Setuju (TS) dituliskan skor 2, Netral (N) dituliskan skor 3, Setuju (S) dituliskan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) dituliskan skor 5.

**Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator**

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Kepatuhan Pembayar Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayar pajak mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan;</li> <li>2. Loyalitas dalam menginformasikan kembali surat pemberitahuan (SPT);</li> <li>3. Loyalitas dalam melakukan pembayaran tunggakan; dan</li> <li>4. Loyalitas dalam melakukan kalkulasi dan pemenuhan pajak secara akurat.</li> </ol>	(Balqis & Rusdi, 2020)
2	Sikap (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niat para pembayar pajak untuk mengkalkulasikan pemenuhan pajak tidak sesuai yang sebenarnya;</li> <li>2. Emosi para pembayar yang merasa dibebani oleh metode perpajakan;</li> <li>3. Sulitnya peraturan perpajakan; dan</li> <li>4. Banyaknya jenis pembayaran pajak.</li> </ol>	(Habibie, 2017)
3	Norma Subjektif (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akibat yang muncul dari teman dan rekan profesi dalam mendorong ketaatan bayar pajak;</li> <li>2. Akibat yang muncul dari para fungsionaris pajak yang dapat</li> </ol>	(Balqis & Rusdi, 2020)

		mendorong ketaatan pajak; dan 3. Akibat yang muncul dari keluarga dalam mendorong ketaatan perpajakan.	
4	Pengendalian persepsi perilaku (X3)	1. Kemungkinan dikenai sanksi. 2. Kemungkinan diperiksa oleh aparat pajak. 3. Kemungkinan pelaporan pihak ketiga.	(Anjani & Restuti, 2016)
5	Kewajiban Moral (X4)	1. Kewajiban pembelanjaan negara adalah tanggung jawab bersama; 2. Adanya emosi khawatir bilamana tidak melakukan kewajibannya dalam dunia perpajakan; 3. Adanya perasaan bersalah ketika melakukan hal yang berkaitan dengan tidak membayar pajak; dan 4. Mengkalkulasikan, melunasi, serta memberitakan pajak secara tulus.	(Ruky et al., 2018)

### 3.6 Metode Analisis

*Statistical Product and Service Solution* digunakan dalam proses analisis fakta lapangan yang telah ditemukan oleh penelaah, selanjutnya akan dilakukan pengujian analisis deskriptif, uji kualitas fakta lapangan yang mana terpecah menjadi pengujian valid tidaknya suatu pertanyaan dan pengujian reliabel atau konsistensi jawaban yang diberikan oleh para penjawab. Teknik yang digunakan untuk mendapati asosiasi yang timbul dari variabel ialah regresi linear berganda,



dan untuk mendapati dugaan yang telah dibuat oleh penelaah maka digunakannya uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji F, dan uji t.

### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran data yang dihasilkan dari fakta lapangan tanpa adanya maksud dijadikan pengambilan kesimpulan (Kawengian et al., 2017). Observasi ini bertujuan untuk menggambarkan kalkulasi data berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), modus, dan standar deviasi.

### 3.6.2 Uji Kualitas Data

#### 3.6.2.1 Uji Validitas

Dalam mengukur bentuk kuesioner memiliki keandalan yang sah maka dilakukan uji validitas (Sudirman et al., 2020). Pengujian ini digunakan untuk mengukur tepat atau tidaknya sebuah data antara fakta lapangan yang terjadi pada suatu objek observasi dengan hasil yang dilaporkan penelaah. Keabsahan suatu item pertanyaan dapat terjadi ketika dapat mengungkapkan fakta lapangan yang diukur dengan kecermatan tinggi. *Product moment pearson* dijadikan dasar melihat valid tidaknya suatu item pertanyaan pada observasi yang dilakukan oleh penelaah dengan cara melihat korelasi antara skor tiap-tiap item pertanyaan dengan skor keseluruhan (Kawengian et al., 2017). Ketika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item yang digunakan oleh penelaah sudah layak (Ramadhan, 2017). tingkat signifikansi yang digunakan ialah 5% untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ .

### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi para penjawab dalam menjawab hal yang berkaitan dengan item pertanyaan yang disusun menjadi bentuk kuesioner (Samudra et al., 2020). Dasar pengambilan kesimpulan dalam observasi ini yakni suatu kuesioner dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  (Pranata & Setiawan, 2015).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian asumsi klasik digunakannya uji normalitas dan uji multikolonieritas dengan tujuan melihat kualitas fakta lapangan yang didapatkan penelaah dan melihat kebenaran serta menghindari prasangka yang tidak sesuai.

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat model yang digunakan penelaah berdistribusi normal atau tidak. Cara melihat model regresi dalam observasi telah terdistribusi normal yakni dengan melihat grafik *probability plot* dan hasil *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2018). Dalam observasi ini penelaah memilih untuk menggunakan grafik *probability plot* yang mana ketika data yang dihasilkan menyebar sesuai garis dan berada grafik histogramnya maka menggambarkan model yang digunakan sudah memenuhi presumsi normalitas, sedangkan ketika data yang dihasilkan tidak berada pada garis dan grafiknya maka model yang digunakan tidak memenuhi presumsi normalitas. Setelah itu penelaah melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yang mana ketika signifikansi  $> 0,05$  maka dapat dikatakan data diterima atau berdistribusi normal, sedangkan ketika signifikansi  $< 0,05$  maka dapat dikatakan data ditolak atau tidak berdistribusi normal.

### 3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Menurut penelitian (Ramadhan, 2017) multikolonieritas bertujuan untuk melihat ada tidaknya kemiripan antara variabel independen yang digunakan penelaah pada suatu pemilihan model. Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian persepsi perilaku dan Kewajiban Moral ialah model yang dipilih dan digunakan penelaah dalam observasi ini.

Kriteria pengambilan keputusan dapat dilihat ketika *tolerance value* tidak  $< 0,1$  begitu pula dengan *inflation factor* (VIF) tidak  $> 10$  yang mana menggambarkan model yang dipilih oleh penelaah tidak terdapat indikasi multikolonieritas yang kemudian dapat digunakan dalam observasi (Samudra et al., 2020).

### 3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik regresi linear berganda bertujuan untuk mendapati besarnya perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh mutasi yang berlangsung pada variabel independen. Model disusun menggunakan persamaan regresi linear berganda (Hirani & Silalahi, 2020) yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

$a$  = *Intercept* (konstanta)

$b$  = koefisien linier berganda

$Y$  = Kepatuhan Pembayar Pajak UMKM di Wilayah Semarang

$X_1$  = Sikap

X2 = Norma Subjektif

X3 = Pengendalian persepsi perilaku

X4 = Kewajiban Moral

e = Kelengahan (error)

### 3.6.5 Uji Kebaikan Model

#### 3.6.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (Ramadhan, 2017). Ketika signifikansi  $f < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang mana berarti adanya dampak yang terjadi pada semua variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya ketika signifikansi  $f > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang mana berarti semua variabel independen tidak memiliki dampak terhadap variabel dependen. Selain itu ketika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  maka tidak adanya dampak simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan ketika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  maka adanya dampak simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 3.6.5.2 Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Pengukuran determinasi (*adjusted  $R^2$* ) bertujuan untuk mendapati sejauh mana variasi dari variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel independen (X) (Samudra et al., 2020). Pada hakikatnya nilai determinasi berada di jarak nol dan satu. Ketika  $R^2$  sama dengan nol menunjukkan bahwa kapabilitas variabel independen dalam mengungkap variasi variabel dependen kurang akurat, sebaliknya ketika  $R^2$  menuju angka satu menunjukkan bahwa kapabilitas variabel independen dalam membagi informasi sudah cukup terhadap variasi dependen,

kemudian ketika  $R^2$  sama dengan satu maka dapat dikatakan kapabilitas variabel independen dalam mengungkap variasi dependen sudah akurat (Sudirman et al., 2020).

### 3.6.5.3 Pengujian Hipotesis

Dalam observasi ini uji yang dipakai untuk melihat hasil dari dugaan yang dibuat oleh penelaah ialah pengujian t. Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan kesimpulan yang mana ketika signifikan  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan representasi dimana variabel independen secara parsial tidak memberikan dampak terhadap variabel dependen, sedangkan ketika signifikansi  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan representasi dimana variabel independen secara parsial memberikan dampak terhadap variabel dependen. Ringkasan dugaan yang digunakan penelaah pada observasi ini yakni:

$H_0$  = dugaan yang mengutarakan tidak adanya dampak antara variabel dengan variabel lainnya.

$H_a$  = dugaan yang mengutarakan adanya dampak antara variabel dengan variabel lainnya.

#### a) Sikap

$H_0 = \beta \leq 0$ , yang mana Sikap tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

$H_a = \beta > 0$ , yang mana Sikap berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

## b) Norma Subjektif

$H_0 = \beta \leq 0$ , yang mana Norma Subjektif tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

$H_a = \beta > 0$ , yang mana Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

## c) Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

$H_0 = \beta \leq 0$ , yang mana Pengendalian persepsi perilaku tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

$H_a = \beta > 0$ , yang mana Pengendalian persepsi perilaku berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

## d) Kewajiban Moral

$H_0 = \beta \leq 0$ , yang mana Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

$H_a = \beta > 0$ , yang mana Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Semarang.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

Observasi ini dilakukan dengan menggunakan sampel yakni usaha mikro kecil dan menengah yang terdapat pada ranah kota Semarang, Jawa Tengah. Instrumen yang digunakan berupa *google form* yang disebarakan pada objek penelitian melalui media sosial seperti instagram dan whatsapp. Penyebaran data sendiri diberikan kepada 150 responden namun ada pula yang tidak ada balasan yakni berjumlah 38 kuesioner, sehingga jawaban yang kemudian dilakukan pengolahan berjumlah 109 karena terdapat 3 hasil responden yang tidak sesuai kriteria.

**Tabel 4. 1 Jumlah Kuesioner Yang Disebar**

No	Keterangan	Jumlah
1	Pertanyaan disebarakan	150
2	Pertanyaan tidak mendapat balasan	(38)
3	Jawaban tidak sesuai kriteria	(3)
4	Jawaban yang dapat diperhitungkan	109
	Persentase hasil tanggapan	72%

Sumber : Data primer yang diolah,2022

#### 4.2 Gambaran Umum Responden

Personalitas para penjawab yang menjadi sampel dalam observasi ini yakni dikelompokkan menurut gender, umur, tingkat pendidikan,

kepemilikan NPWP, dan omzet yang didapatkan dalam setahun. Berikut ini peneliti menyajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, kepemilikan NPWP, dan omzet yang didapatkan dalam setahun.

#### 4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Personalitas para penjawab menurut gender atas dasar gambaran para pelaku UMKM wilayah semarang maka didapatkan hasil pengisian kuesioner responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

**Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	85	78%
Wanita	24	22%
Total	109	100%

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Dari tabulasi yang dikerjakan, dapat dilihat bahwa responden yang terbanyak berada pada bagian pria. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik UMKM didominasi oleh pria dengan total 78%. Hal ini dikarenakan pria memiliki jiwa berwirausaha yang cukup tinggi dan didampingi dengan pemahaman yang cukup luas dalam dunia wirausaha, sehingga usaha mikro kecil dan menengah di ranah kota semarang didominasi para pria.

#### 4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Personalitas para penjawab menurut umur pada UMKM wilayah semarang dapat dilihat pada tabulasi berikut:



**Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
20 - 29	21	19%
30 - 39	77	71%
40 - 49	11	10%
50 -59	0	0%
≥ 60	0	0%
Total	109	100%

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Dilihat dari tabulasi yang dikerjakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penjawab terbanyak berada pada usia 30-39 tahun dengan persentase 71% , responden dengan usia 20-29 tahun sebanyak 21 dengan jumlah persentase 19% dan responden dengan usia 40-49 tahun berjumlah 11 dengan persentase 10%. Dilihat pada data diatas menunjukkan bahwa millennial di indonesia khususnya wilayah semarang itu sendiri cukup banyak yang terjun didunia usaha mikro kecil dan menengah.

#### 4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Personalitas para penjawab menurut kualifikasi tingkat pendidikan didapatkan hasil dari pengisian pertanyaan yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan hasil yang didapatkan dari 100 responden:

**Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	1	1%
Diploma	18	17%

Strata 1	83	76%
Strata 2	7	6%
Strata 3	0	0%
Total	109	100%

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Berdasarkan tabulasi diatas, dapat dilihat bahwa penjawab yang paling banyak merupakan alumnus strata 1 (S1) dengan representasi 76%, penjawab dengan alumnus SMA/SMK berjumlah 1 dengan representasi 1%, penjawab dengan alumnus D3 berjumlah 18 dengan representasi 17%, dan penjawab dengan alumnus S2 berjumlah 7 dengan representasi 6%. Dari penjabaran diatas, dimana menggambarkan pelaku UMKM saat ini dengan kualifikasi tingkat pendidikan didominasi oleh sarjana. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan pekerjaan belum dapat menampung lulusan sarjana, sehingga para sarjana yang juga cukup berpengalaman lebih memilih memiliki usaha yang mana dengan pengetahuan yang didapatkan melalui program sarjana dapat membantu para UMKM dalam melakukan pemasaran produknya dengan digitalisasi yang ada misalnya instagram.

#### 4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Tahun

Personalitas para penjawab menurut omzet per tahun atas dasar gambaran para pelaku UMKM wilayah semarang maka didapatkan hasil pengisian kuesioner para penjawab berdasarkan kekayaannya, yakni:

**Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Tahun**

Kekayaan per tahun	Jumlah	Persentase
< 500 Juta	0	0%
= 500 Juta	102	93%
500 Juta - 1 Miliar	5	5%
1 Miliar – 4,8 Miliar	2	2%
> 4,8 Miliar	0	0%
Total	109	100%

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Dilihat dari tabulasi yang dikerjakan, diketahui yang mana kekayaan terbanyak berada pada omzet 500 juta per tahun dengan jumlah 102 dan dengan persentase 93%, selanjutnya dengan pendapatan antara 500 juta–1 miliar berjumlah 5 dengan persentase 5%, dan kemudian pendapatan antara 1 miliar-4,8 miliar berjumlah 2 dengan persentase 2%. Dengan begitu dapat diketahui bahwa pendapatan para pelaku UMKM di wilayah semarang rata-rata berada pada angka 500 juta yang mana dapat terjadi karena persaingan usaha yang cukup tinggi sehingga para pelaku UMKM harus lebih berkembang dengan cara menciptakan inovasi-inovasi terbaru agar pendapatannya dapat lebih cepat mengalami kenaikan.

#### **4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

Personalitas para penjawab menurut kepemilikan NPWP atas dasar pengambilan hasil dari 100 orang, dapat dilihat pada tabulasi berikut:

**Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan  
NPWP**

NPWP	Jumlah	Persentase
Sudah Ada	109	100%
Belum Ada	0	0%
Total	109	100%

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Dari tabulasi diatas, menggambarkan dimana kepemilikan NPWP pada UMKM semarang berjumlah 109 dengan representasi 100% yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM semarang pada semua responden yang digunakan semuanya mempunyai NPWP. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa kepatuhan pembayar pajak UMKM semarang cukup tinggi karena para pelaku usaha sudah mendaftarkan diri terkait kewajibannya.

### 4.3 Analisis data

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran data yang dihasilkan dari fakta lapangan tanpa adanya maksud dijadikan pengambilan kesimpulan (Kawengian et al., 2017). Observasi ini bertujuan untuk menggambarkan kalkulasi data berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), modus, dan standar deviasi.

**Tabel 4. 7 Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Std. deviation	Mean	median
Sikap	109	14	40	3.844	33.06	33.00
Norma Subjektif	109	8	30	3.077	23.78	24.00
Pengendalian persepsi perilaku	109	10	30	2.867	23.04	23.00
Kewajiban Moral	109	16	55	6.583	46.75	48.00
Kepatuhan wajib pajak	109	12	40	4.706	33.76	34.00

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Dari tabulasi diatas, menunjukkan angka minimum, maksimum, standar deviasi, rata-rata (mean) dan median dari tiap-tiap variabel independen yakni sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku, kewajiban moral, dan variabel dependen yakni kepatuhan pembayar pajak.

Variabel sikap mempunyai nilai minimum yakni 14 dan nilai maksimum yakni 40 dengan nilai rata-rata yakni 33,06 yang mana ketika dibagi dengan 8 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 4,2. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui bahwa para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 (kecenderungan para penjawab memberikan tanggapan setuju) pada setiap poin pertanyaan. Standar deviasi sikap menunjukkan angka 3.844 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yakni 3.844.

Variabel norma subjektif mempunyai nilai minimum yakni 10 dan nilai maksimum yakni 30 dengan nilai rata-rata yakni 23,78 yang mana

ketika dibagi dengan 6 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 4. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui bahwa para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 (kecenderungan para penjawab memberikan tanggapan setuju) pada setiap poin pertanyaan. Standar deviasi norma subjektif menunjukkan angka 3.077 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yakni 3.077.

Variabel pengendalian persepsi perilaku mempunyai nilai minimum yakni 8 dan nilai maksimum yakni 30 dengan nilai rata-rata yakni 23,04 yang mana ketika dibagi dengan 6 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 3,8. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui bahwa para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 (kecenderungan para penjawab memberikan tanggapan setuju) pada setiap poin pertanyaan. Standar deviasi pengendalian persepsi perilaku menunjukkan angka 2.867 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yakni 2.867.

Variabel kewajiban moral mempunyai nilai minimum yakni 16 dan nilai maksimum yakni 55 dengan nilai rata-rata yakni 46,75 yang mana ketika dibagi dengan 11 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 4,2. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui bahwa para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 (kecenderungan para penjawab memberikan tanggapan setuju) pada setiap poin pertanyaan. Standar deviasi kewajiban moral menunjukkan angka 6.583 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yakni 6.583.

Variabel kepatuhan pembayar pajak mempunyai nilai minimum yakni 12 dan nilai maksimum yakni 40 dengan nilai rata-rata yakni 33,76 yang mana ketika dibagi dengan 8 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 4,2. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui bahwa para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 (kecenderungan para penjawab memberikan tanggapan setuju) pada setiap poin pertanyaan. Standar deviasi kepatuhan pembayar pajak menunjukkan angka 4.706 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yakni 4.706.

Dengan hasil yang ada diatas, variabel kewajiban moral mempunyai nilai rata-rata yang berada pada nilai tertinggi. Ketika kepatuhan pembayar pajak yang dilakukan oleh UMKM beranjak baik maka tindakan UMKM yang berkaitan dengan kewajiban moralnya akan semakin baik pula. Sementara itu sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku, dan kepatuhan pembayar pajak memiliki nilai yang cukup untuk mendorong kepatuhan pembayar pajak UMKM. Dari representasi diatas menunjukkan dimana para penjawab telah memegang presumsi terkait sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku, dan kepatuhan pembayar pajak yang tinggi. Median pada observasi ini yang memiliki nilai tertinggi juga berada pada variabel kewajiban moral.

## **4.3.2 Uji Kualitas data**

### **4.3.2.1 Uji Validitas**

Dalam mengukur bentuk kuesioner memiliki keandalan yang sah maka dilakukan uji validitas (Sudirman et al., 2020). Pengujian ini

digunakan untuk mengukur tepat atau tidaknya sebuah data antara fakta lapangan yang terjadi pada suatu objek observasi dengan hasil yang dilaporkan penelaah. Keabsahan suatu item pertanyaan dapat terjadi ketika dapat mengungkapkan fakta lapangan yang diukur dengan kecermatan tinggi. *Product moment pearson* dijadikan dasar melihat valid tidaknya suatu item pertanyaan pada observasi yang dilakukan oleh penelaah dengan cara melihat korelasi antara skor tiap-tiap item pertanyaan dengan skor keseluruhan (Kawengian et al., 2017). Ketika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item yang digunakan oleh penelaah sudah layak (Ramadhan, 2017). Dengan signifikansi 5% dan  $(df) = n-2$ , yang mana  $N=109$  maka  $(df) = 109-2 = 107$ . Dengan penggunaan signifikansi 5% ditemukan  $r$  tabel = 0,1882 ( $r$  tabel pada  $df=107$  dengan penggunaan uji dua sisi).

**Tabel 4. 8 Uji Validitas**

No	Variabel	Item	r Hitung	r Tabel
1	Sikap	X1.1	0,852	0,1882
		X1.2	0,764	0,1882
		X1.3	0,745	0,1882
		X1.4	0,469	0,1882
		X1.5	0,647	0,1882
		X1.6	0,684	0,1882
		X1.7	0,752	0,1882
		X1.8	0,742	0,1882
2	Norma Subjektif	X2.1	0,829	0,1882
		X2.2	0,852	0,1882
		X2.3	0,612	0,1882



		X2.4	0,684	0,1882
		X2.5	0,784	0,1882
		X2.6	0,758	0,1882
3	Pengendalian persepsi perilaku	X3.1	0,702	0,1882
		X3.2	0,641	0,1882
		X3.3	0,713	0,1882
		X3.4	0,780	0,1882
		X3.5	0,698	0,1882
		X3.6	0,798	0,1882
4	Kewajiban Moral	X4.1	0,618	0,1882
		X4.2	0,632	0,1882
		X4.3	0,590	0,1882
		X4.4	0,828	0,1882
		X4.5	0,811	0,1882
		X4.6	0,764	0,1882
		X4.7	0,832	0,1882
		X4.8	0,805	0,1882
		X4.9	0,720	0,1882
		X4.10	0,602	0,1882
		X4.11	0,662	0,1882
5	Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,698	0,1882
		Y2	0,669	0,1882
		Y3	0,808	0,1882
		Y4	0,684	0,1882
		Y5	0,785	0,1882
		Y6	0,831	0,1882
		Y7	0,786	0,1882
		Y8	0,726	0,1882

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Dari tabulasi diatas menyatakan dimana setiap indikator pertanyaan pada seluruh variabel yang ada menggambarkan nilai r hitung > r tabel (0,1882) sehingga instrumen pertanyaan pada observasi yang telah dikerjakan penelaah dapat dikatakan valid.

#### 4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi para penjawab dalam menjawab hal yang berkaitan dengan item pertanyaan yang disusun menjadi bentuk kuesioner (Samudra et al., 2020). Dasar pengambilan kesimpulan dalam observasi ini yakni suatu kuesioner dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Pranata & Setiawan, 2015).

**Tabel 4. 9 Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha
Sikap	0,849
Norma Subjektif	0,844
Pengendalian persepsi perilaku	0,813
Kewajiban Moral	0,906
Kepatuhan Wajib pajak	0,886

Sumber : Data primer yang diolah,2022

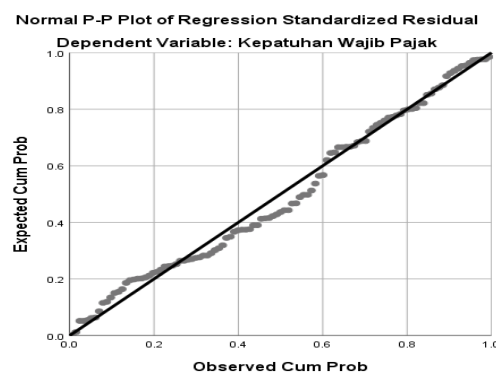
Dari tabulasi diatas dimana hasil kalkulasi dengan SPSS menunjukkan semua nilai Cronbach's Alpha yang didapatkan > 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel pada observasi ini reliabel, yang mana penelaah dapat melaksanakan pengujian selanjutnya.

### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat model yang digunakan penelaah berdistribusi normal atau tidak. Cara melihat model regresi dalam observasi telah terdistribusi normal yakni dengan melihat grafik *probability plot* dan hasil *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2018). Dalam observasi ini penelaah memilih untuk menggunakan grafik *probability plot* yang mana ketika data yang dihasilkan menyebar sesuai garis dan berada grafik histogramnya maka menggambarkan model yang digunakan sudah memenuhi presumsi normalitas, sedangkan ketika data yang dihasilkan tidak berada pada garis dan grafiknya maka model yang digunakan tidak memenuhi presumsi normalitas. Setelah itu penelaah melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yang mana ketika signifikansi  $> 0,05$  maka dapat dikatakan data diterima atau berdistribusi normal, sedangkan ketika signifikansi  $< 0,05$  maka dapat dikatakan data ditolak atau tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian dapat dilihat dibawah ini.

**Gambar 4. 1 Grafik Probability Plot**



Dari grafik probability plot menggambarkan bahwa data yang dihasilkan menyebar sesuai garis dan tepat pada grafik histogramnya maka di sini menggambarkan model yang digunakan sudah memenuhi presumsi normalitas, sehingga kesimpulannya menyatakan dimana data pada observasi sudah memenuhi presumsi normalitas.

**Tabel 4. 10 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov**

Variabel	Signifikansi	Asymp.Sig.(2-tailed)	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,05	0,075	Normal

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Dari tabulasi diatas dengan penggunaan angka *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai Asymp.Sig.(2-tailed) yakni  $0.075 > 0,05$  maka menggambarkan data pada observasi sudah memenuhi presumsi normalitas.

#### 4.3.3.2 Uji Multikolonieritas

Menurut penelitian (Ramadhan, 2017) multikolonieritas bertujuan untuk melihat ada tidaknya kemiripan antara variabel independen yang digunakan penelaah pada suatu pemilihan model. Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian persepsi perilaku dan Kewajiban Moral ialah model yang dipilih dan digunakan penelaah dalam observasi ini.

Kriteria pengambilan keputusan dapat dilihat ketika *tolerance value* tidak  $< 0,1$  begitu pula dengan *inflation factor* (VIF) tidak  $> 10$  yang

mana menggambarkan model yang dipilih oleh penelaah tidak terdapat indikasi multikolonieritas yang kemudian dapat digunakan dalam observasi (Samudra et al., 2020).

**Tabel 4. 11 Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sikap	.326	3.065
	Norma Subjektif	.375	2.666
	Pengendalian	.543	1.842
	Persepsi Perilaku		
	Kewajiban Moral	.621	1.610

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data SPSS diolah, 2022

Berdasarkan hasil kalkulasi SPSS, yang mana uji multikolonieritas tiap variabel independen menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10 (<10) dan nilai tolerance lebih dari 0,1 (>0,1). Dengan melihat hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini tidak mengalami gejala multikolonieritas..

#### 4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Observasi ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan variabel independen yaitu sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku, dan kewajiban moral. Sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan pembayar pajak. Hasil kalkulasi SPSS dapat dilihat pada tabulasi berikut.

**Tabel 4. 12 Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.800	2.939	
	Sikap	.297	.140	.243
	Norma Subjektif	.372	.163	.243
	Pengendalian Persepsi Perilaku	.512	.146	.312
	Kewajiban Moral	.053	.059	.075

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data SPSS diolah, 2022

Persamaan yang timbul berdasarkan pada hasil kalkulasi SPSS yakni:

$$Y = 0,800 + 0,297X_1 + 0,372X_2 + 0,512X_3 + 0,053X_4 + e$$

Dari model persamaan regresi diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,800 yang mana menyatakan ketika seluruh variabel yang digunakan konsisten yaitu sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku, dan kewajiban moral, maka kepatuhan pembayar pajak positif sebesar 0,800.
2. Koefisien X1 yakni 0,297 yang mana menunjukkan bilamana (sikap) kian baik maka kepatuhan pembayar pajak tumbuh sebesar 0,297 dengan presumsi semua variabel yang lain tidak berubah, yang mana

mempunyai arti ketika sikap para pembayar pajak baik maka kepatuhan terhadap kewajibannya akan produktif.

3. Koefisien X2 yakni 0,372 yang mana menunjukkan bilamana (norma subjektif) kian baik maka kepatuhan pembayar pajak tumbuh sebesar 0,372 dengan presumsi semua variabel yang lain tidak berubah, yang mana mempunyai arti ketika norma subjektif baik maka kepatuhan terhadap kewajibannya akan produktif.
4. Koefisien X3 yakni 0,512 yang mana menunjukkan bilamana (pengendalian persepsi perilaku) kian baik maka kepatuhan pembayar pajak tumbuh sebesar 0,512 dengan presumsi semua variabel yang lain tidak berubah, yang mana mempunyai arti ketika pengendalian persepsi perilaku baik maka kepatuhan terhadap kewajibannya akan produktif.
5. Koefisien X4 yakni 0,053 yang mana menunjukkan bilamana (kewajiban moral) kian baik maka kepatuhan pembayar pajak tumbuh sebesar 0,053 dengan presumsi semua variabel yang lain tidak berubah, yang mana mempunyai arti ketika kewajiban moral baik maka kepatuhan terhadap kewajibannya akan produktif.

#### **4.3.5 Uji Keباikan Model**

##### **4.3.5.1 Uji Signifikansi Simultan (F)**

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (Ramadhan, 2017). Ketika signifikansi  $f < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang

mana berarti adanya dampak yang terjadi pada semua variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya ketika signifikansi  $f > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang mana berarti semua variabel independen tidak memiliki dampak terhadap variabel dependen. Selain itu ketika  $F$  hitung  $< F$  tabel maka tidak adanya dampak simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan ketika  $F$  hitung  $> F$  tabel maka adanya dampak simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4. 13 Uji Signifikansi Simultan (F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1327.116	4	331.779	32.409	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1064.682	104	10.237		
	Total	2391.798	108			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Norma Subjektif, Pengendalian Persepsi Perilaku, Sikap						

Sumber: Data SPSS diolah, 2022

Berdasarkan tabulasi pengolahan SPSS, signifikansi menunjukkan  $0,000 < 0,05$  dan  $F$  hitung  $> F$  tabel yaitu  $32.409 > 2,46$  yang mana menunjukkan dimana seluruh variabel independen (sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku, dan kewajiban moral) memiliki dampak terhadap variabel dependen yaitu (kepatuhan pembayar pajak).



#### 4.3.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengukuran determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) bertujuan untuk mendapati sejauh mana variasi dari variabel dependen (Y) dapat diterangkan oleh variabel independen (X) (Samudra et al., 2020). Pada hakikatnya nilai determinasi berada di jarak nol dan satu. Ketika  $R^2$  sama dengan nol menunjukkan bahwa kapabilitas variabel independen dalam mengungkap variasi variabel dependen kurang akurat, sebaliknya ketika  $R^2$  menuju angka satu menunjukkan bahwa kapabilitas variabel independen dalam membagi informasi sudah cukup terhadap variasi dependen, kemudian ketika  $R^2$  sama dengan satu maka dapat dikatakan kapabilitas variabel independen dalam mengungkap variasi dependen sudah akurat (Sudirman et al., 2020).

**Tabel 4. 14 Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 <sup>a</sup>	.555	.538	3.200
a. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral, Norma Subjektif, Pengendalian Persepsi Perilaku, Sikap				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data SPSS diolah, 2022

Berdasarkan tabulasi kalkulasi SPSS, (*Adjusted R square*) yakni 0,538 yang mana menunjukkan bahwa 53,8% variabel independen memberikan dampak terhadap model persamaan yang digunakan pada observasi ini sedangkan 46,2% dikuasai oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

#### 4.3.5.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Dalam observasi ini uji yang dipakai untuk melihat hasil dari dugaan yang dibuat oleh penelaah ialah pengujian t. Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan kesimpulan yang mana ketika signifikan  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan representasi dimana variabel independen secara parsial tidak memberikan dampak terhadap variabel dependen, sedangkan ketika signifikansi  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan representasi dimana variabel independen secara parsial memberikan dampak terhadap variabel dependen.

**Tabel 4. 15 Uji Parsial (t)**

Nama Variabel	Hipotesis	B	Sig	Keterangan	Kesimpulan
Sikap	Positif	0,297	0,036	Positif & Signifikan	Diterima
Norma Subjektif	Positif	0,372	0,025	Positif & Signifikan	Diterima
Pengendalian Persepsi Perilaku	Positif	0,512	0,001	Positif & Signifikan	Diterima
Kewajiban Moral	Positif	0,053	0,370	Positif & Tidak Signifikan	Ditolak

Sumber: Data SPSS diolah, 2022

a) Sikap

Dari tabel diatas, didapatkannya nilai signifikansi variabel sikap yakni 0,036 dengan koefisien regresi menunjukkan nilai 0,297 yang mana dengan signifikansi yang didapatkan dari kalkulasi SPSS  $\alpha = 0,036 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi positif 0,297 maka dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, yang memiliki representasi dimana sikap mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

b) Norma Subjektif

Dari tabel diatas, didapatkannya nilai signifikansi variabel norma subjektif yakni 0,025 dengan koefisien regresi menunjukkan nilai 0,372 yang mana dengan signifikansi yang didapatkan dari kalkulasi SPSS  $\alpha = 0,025 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi positif 0,372 maka dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, yang memiliki representasi dimana norma subjektif mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

c) Pengendalian Persepsi Perilaku

Dari tabel diatas, didapatkannya nilai signifikansi variabel pengendalian persepsi perilaku yakni 0,001 dengan koefisien regresi menunjukkan nilai 0,512 yang mana dengan signifikansi yang didapatkan dari kalkulasi SPSS  $\alpha = 0,001 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi positif 0,512 maka dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, yang memiliki

representasi dimana pengendalian persepsi perilaku mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

#### d) Kewajiban Moral

Dari tabel diatas, didapatkannya nilai signifikansi variabel kewajiban moral yakni 0,370 dan koefisien regresi menunjukkan nilai 0,053 yang mana dengan signifikansi yang didapatkan dari kalkulasi SPSS  $\alpha = 0,370 > 0,05$  dan nilai koefisien regresi positif 0,053 maka dengan demikian  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yang memiliki representasi dimana kewajiban moral mempunyai dampak positif tidak signifikan terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

### 4.3.6 Pembahasan Hasil

#### 4.3.6.1 Pembahasan Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

##### UMKM Wilayah Semarang

Dalam observasi yang dikerjakan oleh penelaah menunjukkan dimana ketika sikap yang dimiliki para pembayar pajak UMKM bagus maka dapat menimbulkan tingginya kepatuhan para pembayar pajak. Berdasarkan representasi tersebut menunjukkan dimana para penjawab sudah memiliki presumsi terkait sikap yang telah memberikan dampak terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

Mengacu pada teori akuntansi keperilakuan dan *theory of planned behavior* yang mana kepribadian seorang individu muncul diakibatkan memiliki keinginan dalam melakukan suatu kepribadian yang mana

keyakinan tersebut dipengaruhi oleh presumsi yang dimiliki para pembayar pajak. Sikap sendiri bukan hanya kepribadian melainkan tendensi untuk melakukan tabiat dengan ragam tertentu terhadap suatu entitas sikap, entitas sikap dapat meliputi individu, kawasan, buah pikiran maupun kondisi. Dengan begitu sikap dapat diartikan sebagai reaksi sepakat maupun tidak sepakat terhadap suatu entitas yang hendak disikapi.

Dalam observasi ini, menunjukkan jika pembayar pajak UMKM memiliki sikap positif kepada pajak maka akan membangun kepribadian para pembayar pajak (kalangan UMKM) untuk taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Semakin bertambah sikap positif terhadap perpajakan maka akan mengakibatkan tingginya kepatuhan pajak. Berdasarkan representasi diatas, pembayar pajak taat dikarenakan para pembayar pajak UMKM memiliki pandangan baik (positif) terkait kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak sehingga para pelaku UMKM lebih terbuka terhadap perpajakan dan tidak melakukan kesalahan secara terencana ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan fiskal.

Hasil observasi ini menunjukkan dimana sikap didukung oleh observasi terdahulu yang telah terbukti yakni sikap memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan para pembayar pajak yang terdapat pada karya (Farida et al., 2020), (Samudra et al., 2020), dan (Wahyuni et al., 2017) yang mana para pembayar pajak UMKM sudah memiliki presumsi dimana membayar pajak dapat memberikan keuntungan maupun manfaat bagi dirinya, sehingga menimbulkan

tindakan positif pembayar pajak UMKM dalam mematuhi aturan perpajakan.

#### **4.3.6.2 Pembahasan Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan**

##### **Wajib Pajak UMKM Wilayah Semarang**

Dalam observasi yang dikerjakan oleh penelaah menunjukkan dimana ketika norma subjektif yang dimiliki para pembayar pajak UMKM bagus maka dapat menimbulkan tingginya kepatuhan para pembayar pajak. Berdasarkan representasi tersebut menunjukkan dimana para penjawab sudah memiliki presumsi terkait norma subjektif yang telah memberikan dampak terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

Mengacu pada *theory of planned behavior* yang mendefinisikan dimana norma subjektif sebagai keseriusan yang tumbuh dalam diri seorang individu terhadap standar tumpuan orang lain yang dijadikan penunjuk oleh individu itu sendiri. Kepatuhan seorang pembayar pajak dapat diimpresikan oleh seseorang atau komunitas lain. Seorang pembayar pajak akan meninjau dampak dari individu lain terhadap dirinya sendiri yang berkaitan dengan ketetapan untuk menurut atau tidak menurut mengenai hukum perpajakan, meskipun seorang individu mempunyai ketetapan sendiri dan berguna namun ketika buah pikir orang lain tidak bisa dianggap fundamental maka langkah tersebut dapat dikatakan batal karena norma subjektif sendiri berkaitan tentang bagaimana presumsi seorang individu terkait dampak sosial dalam membuat perilakunya, yaitu

dimana seorang individu tersebut dapat terpengaruh maupun tidak terpengaruh oleh tekanan sosial di sekitarnya.

Pandangan orang lain dapat memberikan dampak kepatuhan para pembayar pajak UMKM. keseriusan dari seseorang seperti keluarga dekat, teman, mitra kerja, dan masyarakat ketika dapat memberikan pengaruh positif terhadap para pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pajak maka besar kemungkinan para pembayar pajak UMKM ini akan taat pada fiskal. Pengaruh positif yang muncul dapat berbentuk saran maupun dorongan kepada para pelaku UMKM untuk memiliki kepribadian taat.

Hasil observasi ini menunjukkan dimana norma subjektif didukung oleh observasi terdahulu yang telah terbukti yakni norma subjektif memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan para pembayar pajak yang terdapat pada karya (Sudirman et al., 2020), (karolina & Noviari, 2019), dan (Samudra et al., 2020) yang mana lingkungan UMKM memberikan dukungan dalam bentuk motivasi maupun hal lainnya yang berkaitan dengan mematuhi aturan pajak, sehingga pihak UMKM cenderung melakukan kepatuhan pajak.

#### **4.3.6.3 Pembahasan Pengaruh Pengendalian Persepsi Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Wilayah Semarang**

Dalam observasi yang dikerjakan oleh penelaah menunjukkan dimana ketika pengendalian persepsi perilaku yang dimiliki para pembayar pajak UMKM bagus maka dapat menimbulkan tingginya kepatuhan para pembayar pajak. Berdasarkan representasi tersebut menunjukkan dimana

para penjawab sudah memiliki presumsi terkait pengendalian persepsi perilaku yang telah memberikan dampak terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

Mengacu pada *theory of planned behavior* yang mana mendefinisikan pengendalian persepsi perilaku sendiri berasal dari kuat atau tidaknya kendali yang dimiliki oleh seorang individu dalam menunjukkan suatu bentuk kepribadian tertentu. Dalam dunia perpajakan, seorang individu harus memiliki kendali dalam menunjukkan suatu perilaku seperti tidak melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak, dan tidak mengurangi jumlah pembayaran sesuai yang seharusnya.

Hasil observasi ini menunjukkan dimana pengendalian persepsi perilaku didukung oleh observasi terdahulu yang telah terbukti yakni pengendalian persepsi perilaku memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan para pembayar pajak yang terdapat pada karya (Farida et al., 2020), (Samudra et al., 2020), dan (D. Lesmana et al., 2017) yang mana pengendalian persepsi perilaku yang dimiliki para pembayar pajak UMKM wilayah Semarang sangat kuat, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang menimbulkan ketidakpatuhan dalam melakukan kewajibannya atau dapat dikatakan UMKM Semarang patuh terhadap perpajakan.

#### **4.3.6.4 Pembahasan Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan**

##### **Wajib Pajak UMKM Wilayah Semarang**

Dalam observasi yang dikerjakan oleh penelaah menunjukkan dimana kewajiban moral yang dimiliki para pembayar pajak UMKM



bukan merupakan hal yang menimbulkan tingginya kepatuhan para pembayar pajak. Berdasarkan representasi tersebut menunjukkan dimana para penjawab tidak memiliki presumsi terkait kewajiban moral yang mana tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan para pembayar pajak.

Mengacu pada teori atribusi yang mendefinisikan bahwa perilaku seorang individu didasarkan atas kombinasi kekuatan internal, yaitu yang bersumber dari diri seorang individu dan kekuatan eksternal yang berasal dari luar diri seorang individu, Jika dikaitkan dengan kepatuhan pembayar pajak, teori atribusi ini menjelaskan sikap pembayar pajak dalam memberikan penaksiran terhadap kewajibannya sendiri. Berdasarkan pada hasil diatas, menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh namun tidak signifikan yang mana dapat dikatakan bahwa moralitas individu para pembayar pajak UMKM Semarang kurang baik yang berkaitan dengan perasaan cemas atau bersalah yang dimiliki ketika melakukan tindakan tidak membayar pajak, hal ini disebabkan oleh kurangnya prinsip hidup para pembayar pajak yang mana individu dapat saja tidak memiliki perasaan bersalah dan tetap tenang ketika melakukan kecurangan dalam pembayaran kewajibannya.

Hasil observasi ini menunjukkan dimana kewajiban moral didukung oleh observasi terdahulu yang telah terbukti yakni kewajiban moral tidak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan para pembayar pajak yang terdapat pada karya (Ramadhan, 2017), dan kewajiban moral berpengaruh positif namun tidak signifikan yang sesuai

dengan penelitian (Noermansyah & Aslamadin, 2019) yang mana dengan begitu menunjukkan pengaruh bahwa seorang individu (UMKM Semarang) dalam hal moral yang dimiliki tidak menyebabkan tinggi maupun rendahnya kepatuhan pembayar pajak dalam melakukan kewajibannya.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil observasi dan pembahasan yang telah penelaah representasikan sebelumnya, muncul kesimpulan yakni:

1. Sikap terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan para pembayar pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan yang mana ketika sikap yang dimiliki UMKM semakin baik dalam mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak maka kepatuhan itu sendiri akan kian baik.
2. Norma Subjektif terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan para pembayar pajak UMKM yang mana memberikan implikasi dimana ketika norma subjektif yang dimiliki UMKM semakin baik dalam mempengaruhi kepatuhan para pembayar pajak maka akan meningkatkan ketaatan UMKM dalam melakukan seluruh kewajibannya.
3. Pengendalian Persepsi Perilaku terbukti memberikan dampak positif dan terhadap kepatuhan para pembayar pajak UMKM yang mana hal tersebut dapat diartikan ketika para pelaku pembayar pajak UMKM memiliki pengendalian persepsi perilaku yang baik maka akan mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak dengan bentuk makin

baiknya ketaatan para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Kewajiban moral terbukti tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan para pembayar pajak UMKM. Berdasarkan pada representasi penelaah memberikan implikasi bahwa moralitas individu para pembayar pajak UMKM Semarang kurang baik yang berkaitan dengan perasaan cemas atau bersalah yang dimiliki ketika melakukan tindakan tidak membayar pajak, hal ini disebabkan oleh kurangnya prinsip hidup para pembayar pajak yang mana individu dapat saja tidak memiliki perasaan bersalah dan tetap tenang ketika melakukan kecurangan dalam pembayaran kewajibannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan observasi, pembahasan, dan kesimpulan yang telah ditulis oleh penelaah, kemudian dimunculkannya saran yang penulis harapkan dapat memberikan dampak baik bagi para pembayar pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak, serta bagi penelaah selanjutnya:

1. Bagi pihak UMKM

Bagi para pengusaha UMKM diharapkan terus meningkatkan kepatuhan ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang sebenarnya dan tepat pada waktunya yang mana akan digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan merupakan bentuk kontribusi para UMKM kepada negara.

2. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah diharapkan observasi ini mampu memberikan hal yang krusial dan penting untuk dijadikan perhatian dalam rangka menaikkan tingkat kepatuhan para pembayar pajak UMKM di wilayah Semarang dalam memenuhi kewajibannya seperti dalam hal sikap, norma subjektif, pengendalian perilaku dan kewajiban moral.

### 3. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan moralitas para pembayar pajak UMKM dengan lebih memberikan sosialisasi secara berkala dari aparat pajak yang dilakukan secara mendalam terkait arti penting taat membayar pajak untuk kepentingan bersama guna menghindari terjadinya ketidakpatuhan dalam melakukan kewajibannya.

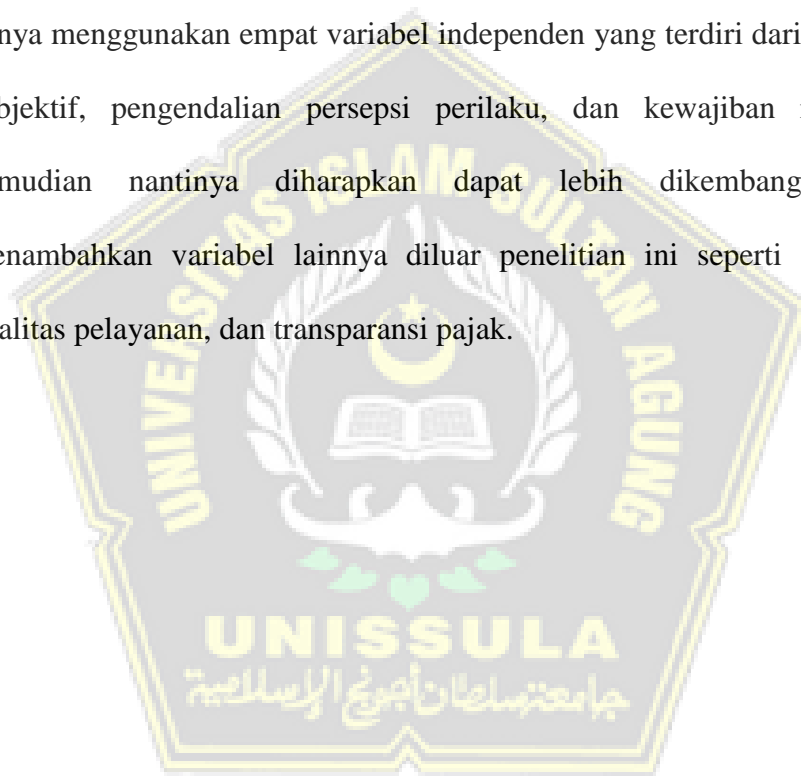
### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan UMKM Wilayah Semarang sebagai responden. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya peneliti lain dapat menggunakan populasi yang lebih besar daripada penelitian yang sudah dilakukan, selain itu dapat juga melakukan penambahan variabel penelitian seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, transparansi pajak maupun variabel lainnya.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan observasi yang telah dikerjakan oleh penelaah, keterbatasan yang muncul pada observasi ini yakni :

1. Dalam mendapatkan responden pada UMKM terdapat beberapa hambatan dikarenakan pandemi COVID-19 yang meningkat kembali maka peneliti beralih untuk menyediakan *google form* untuk pelaku UMKM, sehingga para pelaku UMKM yang berada pada usia 50 tahun keatas sulit dalam melakukan pengisian kuesioner.
2. Variabel yang dipakai penelaah masih spesifik yang mana dalam observasi ini hanya menggunakan empat variabel independen yang terdiri dari sikap, norma subjektif, pengendalian persepsi perilaku, dan kewajiban moral. Yang kemudian nantinya diharapkan dapat lebih dikembangkan dengan menambahkan variabel lainnya diluar penelitian ini seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan transparansi pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, W. A., Dahlan, M., & Yudianto, I. (2021). Determinan Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 2083. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.1007>
- Anjani, D. N., & Restuti, M. M. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 125–144. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2695>
- Aris, B. (2021). *Realisasi Pencapaian Pajak di Jateng I Capai 40,5%*. <https://www.radioidola.com/2021/realisasi-pencapaian-pajak-di-jateng-i-capai-405-persen/>
- Awaluddin, M., & Sukmawati. (2017). Implikasi Theory of Reasoned Action dan Etika dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Niat (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Selayar). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 79–95.
- Balqis, A., & Rusdi. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak, Subjective Norm, Dan Media Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Media Sosial. *Proseding Seminar Nasional ...*, 345–351. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/7708>
- Farida, D. L. H., Rinrin, R. R., & Nurlaela, L. (2020). The Effect of Attitude, Subjective Norm, and Perceived Behavior Control of Taxpayer Compliance of Private Person in Tax Office Garut, Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(1), 298–306. <http://buscompress.com/journal-home.html>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (IBM SPSS)*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Habibie, A. (2017). *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi*. 5(2), 80–96. <https://doi.org/10.31227/osf.io/3h48e>
- Hirani, E., & Silalahi, A. D. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 23–28.
- Kamayanti, A. (2018). Meredefenisi Akuntansi Keperilakuan Melalui Perspektif

Multiparadigma. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, Dan Keuangan Ke III, 1963*, 29–40.

- Kamela, H. (2020). *Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned Of Behaviour ( TPB ) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat*. 5(2), 201–209.
- karolina, M., & Noviari, naniek. (2019). pengaruh sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 800–827. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i02.p01>
- Kawengian, P. V. ., Sabijono, H., & Budiarmo, N. S. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 480–494. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17883.2017>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 1–15. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/view/323>
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2), 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>
- Lubis arfan, I. (2014). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Salemba empat.
- Maharriffyan, M., & Oktaviani, R. M. (2021). Kajian Perilaku Pajak Umkm Dari Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 126–135. <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2550>
- Mitha Pratiwi, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(32), 1357. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p19>
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset ...*, 10(2), 188–195.
- Noermansyah, A. L., & Aslamadin, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 329–339. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.20432>
- Novena, M. (2020). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat 80 persen*.



<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/ungaran/2020/02/25/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-meningkat-80-persen/>

- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. 2, 456–473.
- Putri, D. S., & Subandi, H. (2017). Pengaruh Theory of Planned Behavior, Kewajiban Moral, dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas (Studi Kasus di Wilayah KPP Malang Utara). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://repository.ub.ac.id/2157/>
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh kesadaran, moralitas dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi pada UKM Siola Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi: Equity*, 3(2), 16–33. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/download/411/387>
- Ruky, N. elfa, Putra, wirmie eka, & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 405–418. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Samudra, T. B., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota batu. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Sanjaya, I. P. A. P. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 207–222.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.2320>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). *Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral, dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara*. 3(November).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tarmidi, D., & Nurlita, D. L. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak: Dampak Etika, Kontrol Perilaku Dan Pengetahuan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 10–16.
- Wahyuni, & Amin, A. (2021). karakteristik personal, moralitas pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *EBA Journal*.

Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat Berperilaku Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.

Yustikasari, M. Y., Susyanti, J., & Hufron, M. (2020). *The Influence of Taxpayer Attitudes, Taxpayer Awareness, and Knowledge of Taxation on Individual Taxpayer Compliance with Creative Economy Actors in the Fashion Sub-Sector in Batu City*. 82–94.

